



KEBUTUHAN BERAS DI TARAKAN MASIH BERGANTUNG JAWA DAN SULAWESI

BACA HALAMAN 2



TAUFIK HIDAYAT HIBUR TARAKAN DAN BAGI-BAGI KAOS KE PENONTON

BACA HALAMAN 14

98 Persen Kebutuhan Beras di Tarakan Masih Bergantung Jawa dan Sulawesi

TARAKAN - 98 persen kebutuhan beras di Tarakan masih bergantung kepada wilayah Jawa dan Sulawesi. Demikian disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, Elang Buana, saat ditemui di Tarakan, Selasa (10/10/2023).

“Sekitar 98 persen kebutuhan beras masih bergantung pada Jawa dan Sulawesi. Produksi beras di Tarakan masih sangat sedikit hanya cukup untuk 5 hari,” kata Elang.

Elang menuturkan, jika Tarakan ingin swasembada beras maka diperlukan 3500 hektar dengan lima kali panen dalam dua tahun. Dia menyebut di Tarakan memiliki ribuan hektar, hanya saja belum dimanfaatkan untuk pertanian beras karena minatnya peminat.

Dikatakannya, Tarakan memiliki cukup air yang dibutuhkan untuk dapat meningkatkan produksi pertanian. Hanya saja para petani lebih memilih komoditas lain untuk ditanam.

“Para petani lebih banyak memilih komoditas mana yang lebih untung. Jadi lebih memilih petani sayur dibandingkan dengan petani tanaman pangan. Lebih banyak keuntungan petani sayur sehingga banyak petani memilih itu,” ucapnya.

Alasan lainnya mengapa petani di Tarakan lebih memilih menanam komoditas sayuran ketimbang beras, lanjut Elang, karena masa panen yang lebih cepat sehingga perputaran keuangan bisa lebih cepat. Selain itu, produksi beras membutuhkan proses yang lebih panjang.

“Penanganan panen sayuran lebih mudah. Kalau padi mungkin harus dijemur dirontokkan. Proses olahannya dan pasca panennya sedikit



ADE/MKR

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, Elang Buana.

ribet,” ungkap Elang.

Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Tarakan, Husna Ersant Dirgantara mengatakan untuk Kota Tarakan, kebutuhan beras masih sangat bergantung pada Sulawesi dan Jawa. Dia menyebut salah satu alasan mengapa Tarakan masih sangat bergantung pada Sulawesi dan Jawa, karena Tarakan merupakan

wilayah kepulauan sehingga luasan lahan sawah masih sangat kecil.

“Luasan lahan sawah yang sangat kecil cuman 12,4 hektar. Jadi hampir 99 persen didatangkan dari luar. Luasan lahan kita memang kecil. Untuk tanah cocok aja tapi dari segi luasan memang kecil,” ungkapnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasestia
Editor: Andhika



Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris.

Dorong Peningkatan Anggaran untuk Nelayan

TANJUNG REDEB – Sumber daya alam di Kabupaten Berau sangat melimpah. Salah satunya, di sektor perikanan. Maka dari itu, kesejahteraan nelayan dinilai jajaran legislatif perlu diutamakan.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris mengatakan, agar hasil produksi tangkap nelayan dapat meningkat, perlu adanya dukungan dari pemerintah.

Dia menilai, anggaran bantuan untuk nelayan di Bumi Batiwakkal perlu ditambah. Tujuannya untuk memberi dampak positif terhadap roda perekonomian mereka.

“Jadi agar peningkatan kesejahteraan

nelayan dapat terwujud, perlu adanya tambahan anggaran untuk bantuan ke mereka,” ungkapnya.

Dirinya menerangkan, sekitar 30 persen masyarakat di kabupaten paling utara Kaltim ini bermatapencarian di sektor pertanian dan perikanan.

“Maka dari itu, ini harus benar-benar diperhatikan. Apalagi, masuk ke dalam 18 program unggulan Bupati. Saya harap anggaran bantuan untuk nelayan dapat ditambah,” katanya.

Politikus Demokrat ini membeberkan, selama ini bantuan yang diberikan kepada nelayan memang sudah berjalan. Akan tetapi, sebagian besar

berasal dari pokir anggota dewan di daerah pemilihannya masing-masing.

“Selama ini, Bantuan yang diberikan kepada nelayan berupa alat tangkap dan lainnya. Saya harap dapat lebih, agar nelayan juga semangat meningkatkan produksinya,” tuturnya.

Kendati demikian, Abdul Waris menyebut bahwa pada tahun ini anggaran sekisar Rp 4 miliar digelontorkan untuk sektor perikanan. Sebagian besar, berasal dari pokir dewan.

“Tetapi kan itu tersebar. Kami harap, ada tambahan anggaran dari OPD terkait untuk nelayan kita,” tandasnya. (adv/and)



Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

Berau Kembali Diajak Gabung Kaltara, Madri: Keputusan pada Masyarakat

TANJUNG REDEB – Kabupaten Berau kembali mendapat ajakan untuk bergabung ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Menanggapi persoalan tersebut, Ketua DPRD Berau, Madri Pani menegaskan bahwa keputusan tertinggi ada di tangan masyarakat.

“Saya tidak bisa memberi jawab setuju atau tidak. Biarkan masyarakat yang menilai mengenai mau atau tidaknya bergabung,” ungkapnya.

Menurutnya, kepala daerah harus membuat forum komunikasi yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh kesultanan dan Forkopimda. “Tujuannya membahas ajakan tersebut, supaya ada kejelasan Berau mau bergabung atau tidak,” jelasnya.

Usulan tersebut disampaikan Madri bukan tanpa sebab. Pasalnya, Bumi Batiwakkal memiliki dua kesultanan, yakni Gunung Tabur dan

Sambaliung, serta berbagai suku dan agama yang semuanya memiliki hak didengar pendapatnya.

“Saat ini hanya Bupati saja yang menjawab, kita belum ada membuat forum atau wadah untuk mendengar bagaimana tanggapan masyarakat,” tuturnya.

Politikus Nasional Demokrat (NasDem) ini menyebut, untuk bergabung ke Kaltara diperlukan kajian untung dan rugi. “Itu yang harus dilakukan, supaya jelas apa keuntungannya jika bergabung dan apa kerugiannya jika kita melepaskan diri dari Kaltim,” paparnya.

Selama ini hal tersebut belum pernah dilakukan. Padahal ajakan bergabung tersebut sudah ada sejak 10 tahun lalu. “Sebelum mereka (Kaltara, red) membuat provinsi, bukannya Berau sudah diajak bergabung,” bebernya.

Mantan Kepala Kampung Gurim-

bang ini menambahkan, untuk jarak memang Berau diuntungkan hanya berkisar 3 jam jika ingin ke Kaltara. Namun jarak bukan jaminan apakah jika bergabung Berau akan maju. Ia menambahkan, keputusan bulat ada di tangan masyarakat Berau.

“Sederhana saja, pemerintah memimpin paling lama 10 tahun. Tapi masyarakat bisa puluhan tahun. Makanya saya bilang, Serahkan semua kepada masyarakat. Karena mereka yang merasakan manfaatnya,” bebernya.

Pria yang juga menjabat Pembina Apdesi Berau ini mengaku, dirinya tidak ada hak menentukan Berau harus atau tidak harus bergabung dengan Kaltara. Ia kembali menegaskan, mengikuti apa yang menjadi kemauan masyarakat Berau. “Bukan tidak punya pendirian. Tapi hukum terkuat adalah suara rakyat,” pungkasnya. (adv/and)



Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong

Apresiasi Peluncuran Kamus Bahasa Berau

TANJUNG REDEB - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Berau telah meluncurkan 100 Kamus Bahasa Berau pada edisi pertama tahun 2023. Hal ini sebagai inventarisasi dalam menjaga kelestarian bahasa daerah Berau.

Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong mengaku sangat menyambut baik kamus tersebut. Dirinya mendorong untuk menyosialisasikan hal tersebut ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Berau.

"Itu bisa segera disosialisasikan melalui sekolah-sekolah dalam memperkenalkan bahasa daerah bagi anak-anak kita sebagai generasi muda," ungkapnya.

Lanjutnya, saat ini penutur Bahasa Berau semakin berkurang. Terlebih kabupaten dengan sebutan Bumi Batiwakkal ini menjadi daerah ras majemuk dengan banyaknya pendatang. Sehingga, Bahasa Berau mulai kurang digunakan dalam percakapan sehari-hari.

"Kita mengharapkan di sekolah-sekolah ini ada pelajaran ekstrakurikuler terkait pembelajaran bahasa dan budaya Berau. Jadi perlu dilestarikan jangan sampai bahasa daerah ini hilang," tandasnya. (adv/and)

Berau Expo Harus Didominasi UMKM Lokal

TANJUNGREDEB - Pelaksanaan Berau Expo diharapkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya dapat memajukan UMKM lokal. Dia mengungkapkan, anggaran yang digelontorkan untuk Berau Expo tersebut cukup besar, yakni sekisar Rp 3 miliar. Maka dari itu, UMKM lokal ditegaskannya harus mendominasi.

"Jangan sampai yang mendominasi justru UMKM dari luar Berau. Karena anggaran yang digunakan untuk kegiatan Berau Expo ini nyata dari APBD Berau, jadi sudah seharusnya yang diutamakan untuk mendapat manfaat dari kegiatan itu adalah masyarakat Berau sendiri," ungkapnya.

Lanjut Wendy, pihaknya akan mencoba mengkomunikasikan kepada pihak penyelenggara Berau Expo untuk mengakomodir UMKM lokal mengisi stand-stand Expo yang nantinya akan disiapkan Pemkab Berau.

"Tujuan Berau Expo untuk menarik wisatawan juga. Dengan banyaknya nanti wisatawan yang datang berkunjung ke stand UMKM lokal, maka akan dapat meningkatkan kesejahteraan UMKM lokal kita sendiri," katanya.

Hingga saat ini Komisi II DPRD belum mendapat undangan ataupun mengundang pihak terkait untuk pelaksanaan Berau Expo, namun Wendy berharap dengan nilai anggaran tersebut, pelaksanaan Berau Expo dapat berjalan lancar.

"Yang paling penting adalah memberikan timbal balik yang sepadan terhadap masyarakat Berau," tutup Politikus NasDem ini. (adv/and)



Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya

Peserta Pilkakam Harus Taat Aturan

TANJUNG REDEB – Pemilihan Kepala Kampung (Pilkakam) tahun 2023 yang akan dilakukan secara serentak akan berlangsung. Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Ratna Kalalembang pun meminta agar pagelaran tersebut berjalan aman dan damai.

Ia menilai, kepala kampung bukan merupakan jabatan karir, melainkan jabatan politik. Disebutnya, membangun sebuah kampung bukan merupakan suatu hal mudah, perlu pemikiran yang kritis dan sehat.

“Untuk para calon yang akan berkompetisi, harus menjaga kedaulatan rakyat di kampung. Karena Pilkakam ini bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil,” jelasnya.

Ditegaskannya, calon yang akan mengikuti Pilkakam harus menjaga ketertiban dan ketentraman umum dalam masyarakat. Terlebih, kata Ratna, jangan sampai melakukan kampanye hitam, dengan saling menjatuhkan antara sesama calon.

“Lakukanlah kampanye yang baik, dengan menawarkan program-program yang akan di laksanakan jika terpilih menjadi Kakam,” katanya.

Politikus Golkar ini juga meminta kepada para calon kepala kampung untuk bertanggungjawab kepada seluruh tim pendukung selama dalam proses Pilkakam.

“Jika ada suatu permasalahan yang timbul selama pelaksanaan Pilkakam, hindari cara-cara kekerasan dalam menyelesaikannya,” tegasnya.

Kendati demikian, Ratna meminta kepada peserta Pilkakam untuk menerima hasil keputusan dengan kebesaran jiwa.

“Berikan contoh yang baik kepada generasi kedepannya. Ikuti pelaksanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tandasnya. (adv/and)



Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Ratna Kalalembang

Cegah Penyebaran Rabies, Minta Masyarakat Ketat Menjaga Hewan Peliharaan

TANJUNG REDEB – Penyakit rabies masih menjadi momok menakutkan bagi masyarakat. Pasalnya, beberapa waktu lalu dikabarkan ada seorang anak yang meninggal akibat digigit hewan yang mengalami rabies.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPRD Berau, Sri Kumalasari menghimbau masyarakat agar lebih ketat dalam menjaga hewan peliharaannya serta rutin memberikan vaksinasi.

“Hal ini tidak bisa kita anggap remeh, jika kita lalai nyawa manusia jadi taruhannya,” ungkapnya.

Lanjutnya, ia juga meminta Pemkab Berau melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan upaya-upaya atau sosialisasi serta melakukan vaksinasi gratis untuk hewan milik masyarakat.

“Jika bisa jemput bola, ke wilayah-



Anggota Komisi II DPRD Berau, Sri Kumalasari

wilayah yang banyak hewan yang memiliki potensi menyebabkan rabies ini,” tuturnya.

Politikus Golkar ini menekankan untuk rutin melakukan pemeriksaan dan vaksinasi. Jangan sampai, sudah ada kejadian dan korban baru bergerak. Ditambah vaksinasi disediakan gratis oleh OPD terkait. “Sebagai pelayanan masyarakat, pemerintah daerah melalui Dinas terkait harus bergerak terlebih dahulu, jangan menunggu masyarakat. Ini yang salah,” tegasnya.

Dirinya berharap, penanganan dan pencegahan rabies ini bisa ditangani oleh semua pihak, tidak hanya Pemkab Berau, OPD terkait, tapi juga masyarakat harus ikut peduli dengan lingkungan. “Khusus para pemilik hewan peliharaan, jangan biarkan bebas tanpa pengawasan,” tandasnya. (adv/and)

Ingatkan Bupati Penuhi Janji

TANJUNG REDEB - Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Suharno menyinggung janji kampanye Bupati soal membangun dari pinggiran. Dia membeberkan, saat ini hanya beberapa titik jalan di perkampungan serta jalan usaha tani, yang tersentuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Padahal, infrastruktur jalan tersebut dikatakannya sangat penting dan dibutuhkan untuk menunjang peningkatan perekonomian masyarakat di perkampungan.

“Pada saat kampanye, Bupati sudah sering menjanjikan pembangunan dimulai dari pinggiran. Tapi kenyataannya hanya beberapa titik saja yang tersentuh,” ungkapnya.

Dirinya mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk mengoptimalkan kinerja. Tujuannya agar serapan anggaran dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan mendorong semua pihak untuk melaksanakan pembangunan secara optimal dan padat karya.

“Tentunya dengan tetap memanfaatkan seluruh potensi sumber daya yang tersedia secara sinergi. Dan Kami mohon ke depannya semua OPD-OPD dan yang bertugas di lapangan benar-benar peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan masyarakat,” tegasnya.

Kendati demikian, Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berharap, yang disampaikan pihaknya dapat menjadi perhatian serius, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dapat terwujud.

“Semoga janji-janji Kampanye ditepati. Jangan sampai hanya tinggal janji saja,” pungkasnya. (adv/and)



Wakil Ketua Komisi I DPRD Berau, Suharno

Pembangunan Jangan Hanya di Perkotaan



Anggota Komisi I DPRD Berau, Sujarwo Arif Widodo

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi I DPRD Berau, Sujarwo Arif Widodo meminta pihak eksekutif memperhatikan fasilitas dasar di perkampungan.

Dia menegaskan, agar pembangunan dapat merata, sebaiknya kegiatan peningkatan jalan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan. Sebab menurutnya, hal tersebut sudah tidak wajib dilakukan.

“Kalau jalan yang sudah bagus, jangan diganti beton. Sebaiknya anggarannya dialihkan ke wilayah perkampungan. Karena masih banyak jalan yang belum ditingkatkan. Itu menurut saya lebih baik,” ungkapnya.

Politikus Nasional Demokrat (NasDem) itu menilai, jika kegiatan peningkatan jalan selalu dilakukan di perkotaan, maka akan menimbulkan rasa iri bagi masyarakat perkampungan.

“Apalagi saat ini, warga juga menginginkan peningkatan infrastruktur secara merata,” tuturnya.

Sujarwo berharap agar peningkatan infrastruktur jalan bisa dirasakan semua masyarakat, baik itu yang tinggal di kampung ataupun di perkotaan.

“Masyarakat berharap pemerataan dapat lebih maksimal. Tidak hanya bagi masyarakat di kota atau Tanjung Redeb dan sekitarnya saja. Tapi juga, di kecamatan terjauh,” pungkasnya. (adv/and)



Ketua DPC GMNI Bulungan, Sarah Amelia mengapresiasi pelaksanaan Harlah Bulungan dan Tanjung Selor.

GMNI Apresiasi Perayaan HUT Bulungan dan Kota Tanjung Selor

TANJUNG SELOR - Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Tanjung Selor ke-233 dan Kabupaten Bulungan ke-63 tahun, diwarnai dengan beragam kegiatan yang positif.

Seperti lapak terbuka bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), pawai budaya mengenakan pakian adat istiadat dari bermacam suku, tari adat, lomba balap perahu, panggung hiburan dan sejenisnya.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Bulungan, Sarah Amelia mengapresiasi perayaan HUT Tanjung Selor dan Kabupaten Bulungan, yang dirayakan dengan penuh rasa antusiasme oleh masyarakat.

"Pertama, saya mengucapkan selamat atas hari Jadi Kabupaten Bulungan dan Kota Tanjung Selor, yang bertepatan pada hari ini, Selasa 10 Oktober 2023, momentum ini, juga dirayakan oleh pemerintah dengan beragam

kegiatan positif, dan itu kita apresiasi," ujar Sarah, sapaan akrabnya.

Mengenai beberapa kegiatan yang disajikan, untuk memeriahkan HUT Tanjung Selor dan Kabupaten Bulungan, kata dia patut diacungi jempol. Mengapa demikian, karena telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan pendapatan pelaku UMKM.

Selain itu, perayaan pawai budaya yang digelar setiap perayaan Harlah Tanjung Selor dan Bulungan, merupakan cara pemerintah untuk mempromosikan eksistensi budaya lokal, ke kanca Nasional maupun internasional. Disamping itu, keterlibatan semua etnis yang eksisting di Bulungan merupakan cara pemerintah untuk mengayomi masyarakatnya tanpa memandang ras, suku adat dan tradisi.

"Hal ini menggambarkan bentuk ejwanta dari Bineka Tunggal Ika, artinya perbedaan itu tidak dipandang sebagai sekat pemisah, melainkan

nilai para leluhur yang diwariskan turun temurun, dan wajib kita merawatnya," kata Sarah.

Ia juga mendukung, adanya rencana pemerintah untuk mempromosikan lomba balap perahu di Sungai Kayan, untuk dimuat dalam kalender pariwisata oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

"Kita mendorong dan mendukung rencana itu, karena merupakan cara pemerintah daerah untuk memperkenalkan budaya lokal kita, hingga kelas Nasional bahkan Internasional. Saya berharap gelaran serupa terus ditingkatkan, pada prinsipnya kita mendorong pemerintah untuk mensukseskan pembangunan daerah, meskipun masih ada PR yang belum selesai, kami yakin perlu waktu dan usaha, serta dukungan dari masyarakat," tandasnya. **(tin/and)**

Editor: Andhika



Sosialisasi dari BP2RD Bulungan ke pihak Investor PT KIPI di Tanah Kuning Mangkupati, Kecamatan Tanjung Palas Timur.

Potensi Pajak di Bulungan Terus Digali

TANJUNG SELOR - Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Bulungan, melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning-Mangkupati di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan.

Kunjungan itu dilakukan untuk mendata dan mendaftarkan objek pajak di kawasan industri yang diproyeksikan menjadi terbesar di dunia.

Disampaikan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah BP2RD Bulungan, Imam Hidayat, bahwa sesuai peraturan daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2011, tentang Pajak Daerah.

Ada 11 jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Bulungan. Kemudian, objek pajak tersebut dilakukan pemetaan dan didata untuk diketahui potensi yang dimiliki daerah.

Karena memang, objek pajak ini wajib didata dan didaftarkan sebagai wajib pajak daerah, dengan mem-

berikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).

Salah satunya yang diberikan bagi investor PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI). "NPWPD ini menjadi dokumen kepatuhan, dalam memenuhi kewajiban pajak kepada pemerintah daerah," ujar Kepala Bidang Pengolahan Pendapatan Daerah (BP2RD) Bulungan, Imam Hidayat kepada media ini, Selasa (10/10/2023).

Pihaknya menilai, di KIPI ada beberapa potensi pajak daerah yang mesti ditingkat optimalkan. Untuk menambah pendapatan daerah, salah satunya, pajak air tanah. Selain itu, ada pajak restoran, penerangan jalan dan mineral bukan logam dan batuan. Selanjutnya, objek pajak itu akan ditetapkan oleh PT KIPI sebagai wajib pajak daerah.

"Kalau kita, masih berkoordinasi untuk memberikan pemahaman tentang pelaporan dan penghitungan, dengan tetap berlandaskan pada

aturan yang berlaku," ungkapnya.

Dia melanjutkan, jika telah dipahami oleh para wajib pajak, pemda melalui dinasnya mendorongnya para wajib pajak untuk mematuhi dan memenuhi kewajibannya. Soal besaran potensi pajak tersebut, dirinya belum dapat merinci secara detail.

"Besaran potensi belum bisa kita pastikan ya, karena kita belum menggantongi data pasti dari PT KIPI," ulasnya.

Sementara itu, upati Bulungan, Syarwani menambahkan saat ini Pemda Bulungan terus memaksimalkan penerimaan daerah dari berbagai sektor yang belum ditingkatkan.

"Iya, kita ketahui beberapa objek pajak yang kita miliki belum dikembangkan maksimalkan. Oleh karena itu, perlu terus digali potensinya," singkatnya. (tin/and)

Editor: Andhika



Bupati Bulungan, Syarwani akui masih banyak PR pemerintah yang mesti diselesaikan.

Infrastruktur Masih Menjadi PR Pemerintah Daerah

TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten Bulungan, masih memiliki Pekerjaan Rumah (PR) besar, disela perayaan HUT Kabupaten Bulungan ke-63, dan Kota Tanjung Selor ke-233 tahun 2023.

Bupati Bulungan, Syarwani dalam penyampaiannya menjelaskan masih banyak PR yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Utamanya, dalam hal infrastruktur. Seperti, pembangunan akses infrastruktur jembatan Sungai Nyelung yang menghubungkan Kecamatan Peso dan Peso Hilir.

“Ada beberapa hal penting yang masih menjadi PR pemerintah, salah satunya usulan atau keluhan masyarakat soal perbaikan jembatan Sungai Nyelung,” ucap Syarwani, belum lama ini.

Dikatakan, keadaan jembatan tersebut sering dikeluhkan oleh warga, saat terjadi bencana banjir jembatan itu tengelam. Sehingga tidak bisa dilintasi oleh masyarakat dan ini yang menjadi perhatian pemerintah kedepan.

Pada tahun ini, pemkab Bulungan sudah mulai menangani ruas jalan poros Desa Salimbatu, Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Bulungan. Tetapi, belum semua bisa terselesaikan. Adapun, panjang ruas jalan poros Salimbatu 12 kilometer.

“Infrastruktur jalan juga menjadi perhatian, untuk jalan Salimbatu dikerjakan secara bertahap,” tuturnya.

Ada beberapa catatan infrastruktur jalan yang mesti diperbaiki. Salah satunya, akses penghubung Kecamatan

Tanjung Palas Tengah-Tanjung Palas Utara. Belum lagi kemudian ketika berbicara terkait beberapa ruas jalan lingkungan di desa dan kecamatan yang belum tertangani.

Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan air bersih serta layanan kesehatan dan pendidikan, tetap menjadi atensi pemerintah. Khususnya di wilayah daerah terdepan, terluar, dan terpencil (3T).

“Masih ada berapa titik Kecamatan yang belum terlayani aliran air bersih, kita berharap masyarakat tetap bersabar sembari pemerintah mencari solusi atas persoalan ini,” tutupnya. (tin/and)

Editor: Andhika



Bupati KTT, Ibrahim Ali apresiasi kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup di kota Tarakan.

Kelestarian Lingkungan Hidup, Jadi Perhatian Serius

TANA TIDUNG - Bupati KTT, Ibrahim Ali menghadiri serta berikan atensi pada rapat kerja peningkatan kapasitas dan sinergitas Perangkat Desa, PKK, Perangkat Kecamatan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Kegiatan itu, berlangsung di Kota Tarakan, Selasa (10/10/2023).

Ibrahim Ali saat dikonfirmasi menjelaskan, kegiatan tersebut berupa pengendalian pencemaran lingkungan hidup di KTT. Dirinya mengaku mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap semoga pelaksanaan kegiatan itu dapat memberikan nilai manfaat untuk pengembangan daerah, dan kemajuan bagi masyarakat.

"Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat memberikan nilai manfaat, penguatan pengetahuan dan

keluasan wawasan, seputar lingkungan hidup dan upaya penanggulannya," jelas Ibrahim.

Dikatakannya, saat ini lagi gencarnya isu tentang lingkungan hidup, menjadi isu global yang perlu kita perhatikan dengan seksama. Utamanya, dalam hal pengelolaan limbah yang tepat guna demi kemaslahatan masyarakat.

Dalam upaya penanggulangan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup menurutnya memerlukan kerjasama berbagai pihak. baik pihak pemerintah yang ada di desa, kecamatan hingga kabupaten dalam mengatasi berbagai dampak pencemaran lingkungan.

"Jika lingkungan tidak kita jaga dan rawat, maka berbagai bencana ten-

tu akan mudah datang dan mendera daerah kita. apalagi terkait pencemaran di aliran sungai. Hal ini menjadi perhatian secara serius," tuturnya.

Pasalnya, beragam jenis limbah yang buang ke sungai, dapat memicu terjadinya banjir dan bencana lain. Dikatakan, beberapa waktu lalu Kabupaten Malinau mengalami bencana banjir yang tentu telah merugikan daerah maupun masyarakat.

"Untuk itu, mari bersama kita jaga dan kendalikan berbagai pencemaran lingkungan, dengan berbagai upaya yang terbaik guna terwujudnya Upun Takayang bermartabat, sejahtera, indah dan humanis," tandasnya. (tin/and)

Editor: Andhika



Bupati KTT buka Tournament sepak bola Bupati CUP tahun 2023 di Kecamatan Tana Lia.

Bina Dunia Sepakbola Lahirkan Atlet Unggul

TANA TIDUNG - Sepak Bola merupakan olahraga yang bagus untuk mengembangkan kebugaran fisik, karena mengharuskan untuk berlari di lapangan.

Selain itu, dapat membantu membangun kekuatan dan daya tahan otot, demi meningkatkan kesehatan. Hal itu disampaikan oleh Bupati KTT Ibrahim Ali, disela pembukaan kegiatan open Tournament Bupati Cup 2023 di Kecamatan Tana Lia, Selasa (10/10/2023).

“Saya meminta peserta yang terlibat dalam pertandingan, untuk tetap menjunjung tinggi sportifitas serta terciptanya kondusifitas dengan penuh rasa persaudaraan,” ujarnya.

Dikatakan Bupati, bahwa dalam hal pertandingan tentu ada yang menang dan kalah. kemenangan akan diraih melalui latihan yang disiplin, jauh sebelum pertandingan pada turnamen ini dimulai. “Karena esensinya, hasil yang diraih akan berbanding lurus dengan usaha latihan yang terus-menerus. tidak ada kemenangan yang kebetulan, kecuali jika pihak lawan mengalami Walkover (WO),” jelasnya.

Ada hal yang patut dipahami, bahwa proses itu tidak akan pernah menghinai hasil. “Terhadap tim yang kalah, bukan berarti kemenangan tidak per-

nah berpihak kepada kita, melainkan hanya butuh lebih banyak latihan sehingga bisa meraih keberhasilan atau kemenangan,” tuturnya.

Disamping itu, ada kondisi psikologis antar tim yang harus dibangun, sehingga kekompakan itulah yang akan melahirkan injeksi spirit luar biasa dan bisa bekerjasama memenangkan pertarungan. “Saya berpesan kegia-

tan turnamen ini dapat dikawal secara bersama, dan dapat berjalan secara sehat, sportif dan kondusif,” harapnya.

Sehingga, kegiatan turnamen bupati cup tahun 2023, dapat menjadi agenda yang terus melahirkan para atlit sepak bola yang mengharumkan nama baik KTT. (tin/and)

Editor: Andhika



Sekda Tarakan Minta ASN Netral di Pemilu 2024, Larang Like, Comment dan Share Postingan Caleg

TARAKAN - Menjelang pesta demokrasi pada 2024 mendatang, menjadi tahun rawan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tak terkecuali di Kota Tarakan. Terkait hal itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Tarakan, Hamid Amren, meminta agar seluruh ASN untuk menjaga netralitasnya menghadapi tahun politik lima tahunan tersebut.

Tak hanya itu, Pemerintah Kota Tarakan juga telah mengeluarkan Surat Edaran yang isinya mewajibkan ASN untuk bersikap netral.

"Itu memang harus diikuti dan dipatuhi oleh seluruh ASN. Sudah kita keluarkan surat edaran Wali Kota Tarakan," ujar Hamid Amren, saat ditemui di Tarakan, Selasa (10/10/2023).

Hamid menuturkan, pihaknya dibantu Bawaslu akan memonitor pengawasan netralitas ASN selama Pemilu berlangsung. ASN yang melanggar SKB akan dijatuhkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahannya.

Dilanjutkannya, hukuman yang berlaku sesuai tingkatan yaitu hukuman ringan berupa teguran tertulis, teguran secara lisan. Hukuman sedang yaitu penurunan pangkat, penurunan gaji berkala dan Hukuman berat, pemberhentian dari jabatan dan lainnya. "Tapi ini semua melalui proses, termasuk rekomendasi dari Bawaslu," jelasnya.

Menurutnya, netralitas ASN perlu dilakukan karena mereka mendapatkan gaji dari uang rakyat sedangkan rakyat mendukung macam-macam partai dan latar belakang. ASN harus memberikan pelayanan yang setara kepada rakyat dengan tidak mementingkan kepentingan pribadi.

"Ini harus setara, karena ini partai ibu saya orang-orangnya saya dahu-lukan. Karena ini bukan dari partai yang ada keluarga saya nanti saja. Itu tidak boleh," ungkapnya.

ASN memiliki fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan pemersatu bangsa. Jika ASN mengutamakan kepentingan pribadi maka fungsi tersebut tidak bisa berjalan. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SBT) maka



ADE/MKR

Sekretaris Daerah (Sekda) Tarakan, Hamid Amren.

seluruh ASN wajib untuk mengikuti peraturan tersebut.

Hal itu pun telah disosialisasikan sehingga tidak ada alasan untuk ASN melanggar peraturan tersebut.

"Itu asas hukum, setiap aturan yang dikeluarkan dianggap tahu. Jangan kan ASN, masyarakat juga begitu apalagi ASN. Pada saat undang-undang ini di undang makas setiap warga negara dianggap mengetahui," pungkasnya.

Sebagai informasi, Pemerintah mengharapkan Aparatur sipil negara (ASN) netral dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022. SKB tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Bi-

rokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum. Pelanggaran yang diatur dalam SKB salah satunya yaitu membuat postingan, comment, share, like, bergabung dalam grup atau akun pemenangan Calon Legislatif (Caleg). Memposting pada media sosial maupun media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan bakal Calon Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPRD, Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, serta menunjukkan dukungan dengan alat peraga dan semacamnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika

Bawaslu Lakukan Penertiban Baliho yang Melanggar Aturan

TARAKAN - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tarakan melakukan penertiban dengan menurunkan baliho bakal calon legislatif (baca-leg), Senin (9/10/2023) malam. Baliho tersebut diturunkan lantaran melanggar aturan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu khususnya pada pasal 79 ayat 4.

Anggota Bawaslu Tarakan Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Muhammad Saifullah mengatakan, dalam pasal 79 ayat 4 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu dijelaskan bahwa pemasangan baliho sebelum masa kampanye dilarang memuat citra diri dan unsur ajakan.

“Dalam hal ini partai politik dan nomor urut sesuai dengan PKPU yang ada dalam pasal 79 ayat 4. Kemudian dia mengandung unsur ajakan. Itulah yang akan kita tertibkan,” kata Saifullah saat diwawancarai awak media, Senin (9/10/2023).

Dia mengungkapkan penurunan baliho melibatkan 80 orang yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemi-

lian Umum (Panwaslu) disetiap kecamatan, Satpol PP, Koramil dan Polsek setempat.

Kata Saifullah, Bawaslu telah mengingatkan kepada parpol dan bacaleg untuk tak melanggar aturan pemasangan baliho sesuai dengan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang kampanye Pemilu 2024. Salah satunya dengan melakukan imbauan secara tertulis kepada parpol mulai 1 Agustus 2023. Kemudian mengundang parpol untuk rapat bersama menghimbau hal apa saja yang tidak boleh ditampilkan pada Alat Peraga Kampanye (APK) termasuk baliho.

Namun imbauan tersebut tak kunjung ditindaklanjuti parpol sehingga Bawaslu akhirnya melakukan penindakan dengan menurunkan baliho.

“Kami sudah memberi imbauan untuk melakukan penertiban secara mandiri. Namun hingga hari ini masih banyak baliho yang mengandung citra diri sehingga kita melakukan penertiban secara langsung dengan melibatkan tim yang ada,” lanjutnya.

Saifullah lanjut menjelaskan penurunan baliho ini, menyoal pada

beberapa rute yang telah dilakukan pemetaan oleh Bawaslu Tarakan.

“Sebenarnya kita sudah membuat rute jadi masing-masing kecamatan akan menelusuri jalan-jalan besar dan daerah yang sudah sebelumnya dilakukan pemetaan. Ini yang menjadi target kami untuk diturunkan,” ucapnya.

Penertiban baliho ini, lanjut Saifullah, dilakukan dengan mengutamakan prinsip tanpa pandang bulu. Artinya, setiap baliho yang melanggar bakal dilakukan penindakan.

“Kalau untuk berbayar yang di lampu merah, sebisa mungkin kita akan turunkan tetap. Karena demi unsur keadilan. Tapi kalau untuk pada malam ini tidak bisa diturunkan langsung kita akan koordinasi penyedia tempat penyewaan reklame dan kepada pemasangnya dalam hal ini parpolnya,” katanya.

Dia menyebut baliho hasil penindakan nantinya akan disimpan oleh Panwascam di masing-masing kecamatan. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika

Taufik Hidayat Hibur BL dan Bagi-bagi Kaos ke Penonton

TARAKAN - Kejuaraan bulutangkis KJA Open with Lantamal XIII tahun 2023, yang dimulai sejak Jumat lalu, resmi berakhir pada Selasa (10/10/2023). Salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu para Badminton Lovers (BL) di Tarakan, ialah kehadiran peraih emas olimpiade Athena 2024 yakni Taufik Hidayat.

Taufik Hidayat memang dijadwalkan hadir untuk pertandingan ekshibisi sekaligus menutup perlombaan bulutangkis tersebut. Dalam pertandingan tersebut, Taufik Hidayat berpasangan dengan Wali Kota Tarakan, Khairul melawan Anggota DPR RI Dapil Kaltara, Dedy Sitorus berpasangan dengan perwakilan Perusahaan KJA Group, Hariono. Pertandingan tersebut dimenangkan oleh pasangan Taufik Hidayat dengan Wali Kota Tarakan, Khairul dengan dua game langsung.

Usai pertandingan, Taufik Hidayat menyampaikan harapan kepada Pemerintah setempat untuk dapat memfasilitasi atlet muda di Tarakan dengan lapangan berstandar nasional. Menurut Taufik, lapangan tersebut sangat diperlukan untuk menunjang bakat pada atlet muda di Tarakan. “Saya berharap Pemerintah setempat berkolaborasi dengan pengusaha dapat memfasilitasi lapangan yang berkelas. Karena kalau tidak ada lapangan atlet susah untuk bermain dan mengembangkan bakat,” ucap Taufik Hidayat disambut riuh tepukan penonton.

Taufik menilai antusias masyarakat Tarakan terhadap olahraga bulutangkis sangat tinggi. Terbukti, dengan ra-

mainya penonton yang hadir di lapangan. Karenanya, dia berharap ada pembinaan atlet muda bulutangkis di Tarakan sehingga dapat berkencan di nasional bahkan internasional. “Mudah-mudahan ke depannya lebih baik. Karena bisa dibilang di Indonesia ini salah satu olahraga yang banyak berprestasi adalah bulutangkis,” katanya. Di kesempatan ini pula, Taufik membagikan dua buah kaos bertandatangan dirinya kepada para penonton. Sontak, di tengah pembagian tersebut para penonton histeris sambil memperebutkan kaos yang dilempar oleh Taufik Hidayat. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika



Taufik Hidayat saat melakukan pertandingan ekshibisi.

Raker APEKSI Komwil V Hasilkan Rekomendasi Kebijakan

TARAKAN - Pertemuan Wali Kota se-Kalimantan dalam forum Rapat Kerja APEKSI Komwil V secara resmi berakhir pada Senin petang, (9/10/2023). Raker yang dilaksanakan di Kayan Hall Tarakan Plaza ini menghasilkan beberapa rekomendasi bagi APEKSI Pusat untuk disampaikan kepada Pemerintah Pusat.

Wali Kota Tarakan, Khairul mengatakan, beberapa rekomendasi yang dihasilkan dalam Raker APEKSI Komwil V tersebut diantaranya percepatan peningkatan konektivitas antar daerah di Kalimantan yang diusulkan masuk dalam Program Strategis Nasional, penguatan infrastruktur dan layanan publik, dan strategi penurunan angka stunting melalui sinergisitas antar pemangku kepentingan.

Di samping itu, lanjut Khairul, disepakati berbagai komitmen penguatan internal organisasi APEKSI Komwil V Kalimantan dalam rangka penguatan sinergi dan kolaborasi yang selama ini telah terjalin di antara kota-kota di Kalimantan.

Khairul menjelaskan, pertemuan para Wali Kota se-Kalimantan ini, merupakan wadah penguatan sinergi dan kolaborasi dalam rangka memperjuangkan aspirasi pemerintah dan masyarakat perkotaan.

Melalui rapat kerja ini, dia berharap dapat bermanfaat kepada seluruh daerah di Kalimantan. Salah satu rapat kerja ini membahas tema utama "Sinergisitas Stakeholder Penurunan Stunting".

Penurunan stunting dianggap perlu diatasi karena Indonesia sedang

menyiapkan generasi emas di tahun 2045. Generasi emas atau generasi muda yang disiapkan untuk memimpin bangsa di 2045 harus memiliki mental dan jiwa yang sehat.

Dalam rapat kerja ini, Tarakan dipilih menjadi tuan rumah APEKSI regional Kalimantan dan dihadiri sembilan anggota kepala daerah. Adapun sembilan anggota dalam APEKSI regional Kalimantan adalah Banjarmasin, Balikpapan, Palangka Raya, Pontianak, Banjarbaru, Singkawang, Bontang, Samarinda dan Tarakan.

Raker ini ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh para Wali Kota dan pimpinan delegasi Pemerintah Kota. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika

Belum Masuk Kampanye, Bawaslu Tertibkan 800 Baliho

TARAKAN - Senin (9/10/2023) kemarin malam, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tarakan melakukan penertiban baliho caleg. Dari hasil penertiban itu, total ada 800 baliho yang diturunkan Bawaslu Tarakan karena melanggar aturan PKPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.

Anggota Bawaslu Tarakan Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Muhammad Saifullah mengatakan penurunan baliho dimulai pukul 19.30 hingga 02.30 Wita dini hari. Dengan menasar baliho yang terpasang di jalan utama dan sebagian jalan di sekitarnya.

Usai melakukan penurunan baliho, Saifullah mengingatkan seluruh parpol maupun caleg untuk tak lagi memasang baliho yang memuat citra diri dan terdapat unsur ajakan. Terlebih, saat ini belum memasuki masa kampanye.

Saifullah tak menampik jika Bawaslu menemui kendala dalam penertiban baliho caleg. Salah satu kendala yang dialami yakni kurangnya alat dan tenaga untuk menjangkau posisi baliho.

"Penertiban yang dilakukan semalam, tentu tidak bisa menjangkau semua wilayah pemasangan yang tersebar sangat banyak dan bahkan sampai ke jalan-jalan, gang kecil dan lorong," kata Saifullah saat dikonfirmasi,



Bawaslu saat menurunkan baliho di Tarakan.

masi, Selasa (10/10/2023).

"Untuk masuk lebih jauh lagi belum karena keterbatasan tenaga dan juga alat. Selain itu, menurunkan spanduk atau baliho yang letaknya tinggi juga sulit dijangkau. Ada juga yang berada dalam pekarangan rumah yang pagarnya tertutup. Karena kondisinya malam jadi tim tidak ingin mengganggu waktu istirahat pemilik rumah," sambungnya.

Akibat dari kendala tersebut, lanjutnya, penertiban baliho hanya dapat menjangkau jalan utama. Sementara

untuk baliho yang belum diturunkan, Bawaslu akan melakukan berkoordinasi untuk segera menurunkannya.

"Semua yang belum dapat ditertibkan semalam, telah kita inventaris untuk nanti dibentuk tim kecil untuk melakukan penertiban. Tim akan segera turun menunggu kesediaan alat bantu yang akan digunakan, seperti mobil yang memiliki fasilitas tangga hidrolik," ucapnya. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika



Kasatreskrim Polres Tarakan, AKP Randhya Sakhika Putra.

ADE/MKR

Periksa 28 Saksi Demi Ungkap Kasus Pembunuhan Wanita di Tarakan, Hasilnya Masih Nihil

TARAKAN – Sudah satu bulan lamanya, sejak mayat N (20) ditemukan meninggal pada Sabtu (26/8/2023) lalu, pihak kepolisian belum juga bisa mengungkap siapa pelaku pembunuhan terhadap gadis malang tersebut.

Untuk diketahui, kasus pembunuhan N sempat membuat geger masyarakat Kota Tarakan. Sebab, ia ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan dengan leher terlilit kabel di kamar sebuah indekos di Jalan Lumpuran, Kampung Satu, Kota Tarakan.

Kasatreskrim Polres Tarakan, AKP Randhya Sakhika Putra pun mengupdate kelanjutan dari kasus pembunuhan wanita cantik tersebut. Diungkapkannya, saat ini pemeriksaan saksi terus bertambah. Dari yang sebelumnya 27 kini bertambah menjadi 28 saksi. Penambahan saksi itu berasal pelanggan jasa N, yang belakangan diketahui bekerja sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK).

Dari pemeriksaan terhadap 28 saksi tersebut, polisi telah mencurigai beberapa pihak sebagai terduga pelaku. Hanya saja, untuk penetapan tersangka masih membutuhkan alat

bukti tambahan.

“Kita sebagai penyidik tidak bisa tanpa alat bukti yang cukup langsung menetapkan tersangka, kecuali dia tertangkap tangan,” ungkapnya kepada media saat ditemui di Kantor Polres Tarakan, Selasa (10/10/2023).

Randhya menambahkan, kepolisian telah berkoordinasi dengan perusahaan Michat, namun sejauh ini pihaknya belum menemukan akun Michat korban yang lain.

“Dari tiga akun yang telah ditemukan namun adanya riwayat lama. Dari koordinasi Michat Singapura, dalam Bahasa Inggris dijelaskannya tidak ada riwayat chat di tanggal 24,25 dan 26. Makanya penyidik masih kesulitan,” ucapnya.

Terkait hasil Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor), saat ini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan DNA. Sebab Puslabfor Polda Jatim meminta waktu tambahan untuk pemeriksaan DNA.

“Untuk hasil Labfor, professor masih meminta waktu kepada penyidik untuk menganalisa DNA. Karena di TKP banyak orang masuk jadi DNA acak,” terangnya.

Randhya lanjut menjelaskan,

pelaku tidak ada usaha untuk mengaburkan alat bukti. Dari analisa penyidik, diketahui pelaku tidak ada memegang barang lain selain kabel. “Tidak ada memegang barang lain kecuali kabel. Tapi di kabel itu hanya DNA bukan sidik jari,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, kasus pembunuhan N sempat menghebohkan masyarakat Kota Tarakan. Keberadaan jasad N pertama kali diketahui pada Sabtu (26/8/2023) pukul 08.30 Wita. Orang yang pertama kali melihatnya adalah tetangga sebelah kamar korban. Yang pada saat itu ingin mengambil laundry.

Sementara, N terakhir kali ditemukan sebelum meninggal dunia, pada pukul 23.00 Wita. Saat ditemukan, N sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan leher terlilit kabel.

Berdasarkan hasil visum, diketahui korban meninggal dunia disebabkan karena kekurangan oksigen. Sementara dari hasil autopsi, diketahui organ tubuh korban masih dalam keadaan bersih dan tidak ditemukan racun ataupun alkohol. (apc/and)

Reporter: Ade Prasetya
Editor: Andhika



TERVERIFIKASI
DEWANPERS

PASANG IKLAN HUBUNGI
0811 5405 033

Lebih Dekat dengan Satu Klik



OPERASI ANTIK MAHAKAM 2023 UNGKAP 252 KASUS

BACA HALAMAN 2-3



**BANGUN KERJASAMA
DENGAN DPRD PASER,
MEDIA KALTIM KENALKAN
PRODUK KORAN DIGITAL
BACA HALAMAN 31**



Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo didampingi Wakil Direktur Reskoba Polda Kaltim, AKBP Rino Eko menunjukkan barang bukti dan tersangka hasil Operasi Antik Mahakam 2023.

Operasi Antik Mahakam 2023

Ungkap 252 Kasus dengan 331 Tersangka Narkoba

BALIKPAPAN - Polda Kaltim melalui Direktorat Reserse Narkoba (Ditreskoba) baru saja selesai menggelar Operasi Antik Mahakam 2023 termasuk di Polres jajaran. Dan hasilnya, sebanyak 252 kasus narkoba dengan 331 tersangka berhasil diungkap.

KabidHumasPoldaKaltim,Kombes

PolYusufSutejo didampingi Wakil Direktur Reskoba Polda Kaltim, AKBP Rino Eko mengatakan, pengungkapan kasus narkoba lewat Operasi Antik Mahakam 2023 yang berlangsung selama 21 hari yakni mulai 19 September hingga 9 Oktober 2023, merupakan hasil kerja keras dari seluruh personel Polda Kaltim dan Polres

jajarannya. "Dengan jumlah tersangka 331 dengan rincian 306 laki-laki dan 25 orang perempuan," ujar Yusuf, Selasa (10/10/2023).

Lebih lanjut Yusuf menjelaskan, dari 252 kasus tersebut, sebanyak 14 kasus di antaranya berhasil diungkap oleh Polda Kaltim. "Untuk kasus yang ditangani oleh Direktorat

Narkoba Polda Kaltim, berhasil mengungkap 14 kasus dengan jumlah tersangka 24 orang," jelasnya.

Sedangkan untuk Polres jajaran, sebanyak 51 kasus berhasil diungkap oleh Polres Samarinda, 29 kasus oleh Polresta Balikpapan, 45 kasus oleh Polres Kutai Kartanegara, 27 kasus oleh Polres Kutai Timur, 14 kasus oleh Polres Kutai Barat, 18 kasus oleh Polres Bontang, 26 kasus oleh Polres

Berau, 11 kasus oleh Polres Paser, 14 kasus oleh Polres PPU, dan 3 kasus oleh Polres Mahulu.

Dari hasil pengungkapan kasus tersebut, Polda Kaltim dan jajarannya berhasil mengamankan barang bukti berupa 1.463,81 gram sabu-sabu, 20 butir ekstasi, 12,3 gram ganja, dan 8.674 butir obat keras. "Barang bukti tersebut akan dimusnahkan dalam waktu dekat ini," tambah Yusuf.

Yusuf mengaku, bahwa Polda Kaltim akan terus berupaya untuk memberantas peredaran narkoba di Kalimantan Timur. "Kami akan bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat untuk memberantas peredaran narkoba di Kalimantan Timur," tutupnya.

Penulis: Aprianto

Editor: Nicha Ratnasari



LET'S GO BEYOND



BOOKING THS SAJA

BTS

di Digizoom



DAPATKAN GRATIS 1st OLI TMO SYNETIC SETIAP SERVICE BERKALA*



THS Sama Lengkapnya Dengan Bengkel



Mekanik Professional | Memenuhi SOP Kesehatan
Part Original | Tanpa Biaya Kunjungan | Bergaransi

Kode Promo
BTSOLI

Informasi - Call/WA :

Adi S : 0822-5435-0088



*Syarat dan ketentuan berlaku

Urusan Toyota lebih mudah!

AUTO 2000
member of ASTRA

Bontang




Lebih Dekat dengan Satu Klik



http://koran.mediakaltim.com/

INFO & PEMASANGAN IKLAN
CP. 0811 5405 033

 media_kaltim
  mediakaltimdotcom
  mediakaltim.com
  media kaltim



BEDAH BUKU : Wagub Kaltara, Dr Yansen TP, M.Si menghadiri Peluncuran dan Bedah Buku Bisnis Properti Semudah Tersenyum di Lantai 2 Ballroom Hotel Luminor, Selasa (10/10).

Ajak Generasi Muda Terjun ke Dunia Bisnis

TANJUNG SELOR - Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. Yansen TP, M.Si hadir dalam peluncuran dan bedah buku Bisnis Properti Semudah Tersenyum karya Alimuddin, di Lantai 2 Ballroom Hotel Luminor, Selasa (10/10).

Dalam kesempatan itu dimoderatori oleh Konten Manajer Tribun Kaltara, Sumarsono dan menjadi Panelis, Dekan FKIP Universitas Borneo Tarakan, Suyadi, SS., M.Ed., Ph.D.

Wagub Yansen mengapresiasi terselenggaranya agenda bedah buku itu karena menjadi yang pertama dilakukan di Kaltara. Ia pun mengajak agar para generasi muda agar tidak perlu khawatir ketika terjun ke

dunia bisnis.

Ia menyampaikan pemahaman literasi ini bukan hanya baca tulis berhitung tapi pemahaman konteks nilai dan membangun simbol, arti simbol adalah perilaku. "Jadi dengan menggiatnya dunia literasi seperti mewujudkan potensi dan kekuatan serta kualitas hidup masyarakat di Kalimantan Utara," ucapnya

Hubungan dengan penulisan buku ini tidak lain adalah sebuah contoh baik seorang yang belajar membangun bisa melahirkan karya - karya misalkan usaha properti

Dalam kesempatan itu, Yansen menghimbau bahwa banyak properti sangat menjanjikan keuntungan,

tapi alangkah bagusnya properti yang berkualitas baik. "Artinya sektor Properti yang dikembangkan di Kaltara harus memiliki standar yang bagus sehingga memiliki kualitas yang baik pula," paparnya.

Untuk itulah pada para pengembang tidak sekadar berorientasi mendapat keuntungan. Tapi kelayakan untuk masyarakat Kalimantan Utara.

"Harapan saya akan muncul generasi yang menggeluti dunia properti ini, anak muda jangan menyerah karena properti biaya resiko besar, adanya peluang yang besar properti Kalimantan Utara bisa digeluti dengan baik," tutup Wagub Yansen. (dkisp)



PAPARAN : Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum memaparkan kondisi Karhutla di Kaltara, Senin (10/10).

Tren Karhutla di Kaltara Turun Signifikan, Pemerintah Pusat Berikan Apresiasi

JAKARTA – Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum menyampaikan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) mengalami penurunan yang signifikan sejak tahun 2019. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) yang digelar di Auditorium Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK RI), Senin (9/10).

Dilansir dari situs sipongi.menhk.go.id, pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2019 terdapat penurunan akumulasi luas Karhutla seluas 8.189 Ha atau sebesar 95.68 persen, sedangkan hingga Agustus 2023, luas Karhutla di Kaltara seluas 364,05 Ha yang mana masih lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang seluas 370 Ha.

Ia memaparkan bahwa Karhutla di Kaltara tahun 2023 lebih dominan terjadi pada jenis mineral dengan tutupan lahan non hutan yang umumnya terjadi pada area semak belukar dan berada diluar kawasan hutan.

“Secara keseluruhan, kejadian Karhutla di Kaltara merupakan kegiatan penyiapan lahan untuk berladang, yang pembakarannya terkendali dan didampingi anggota Brgidal Karhutla dan Kelompok Masyarakat Peduli Api,” lanjut Gubernur memaparkan kondisi Kaltara.

Rapat dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolkum), Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, bersama jajaran pejabat tinggi negara lainnya serta hadir para Kepala Daerah yang memiliki wilayah berpotensi terjadi Karhutla seperti Kaltara.

Sebagaimana prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), ancaman El Nino tahun ini akan berdampak pada beberapa hal salah satunya ialah meningkatnya titik Karhutla seperti tahun 2019 lalu.

Di beberapa wilayah Indonesia khususnya pulau Kalimantan dan Sumatera muncul beberapa titik kebakaran yang menimbulkan kabut asap, tak luput juga wilayah Kaltara

sehingga perlu perhatian dari semua sektor mulai dari Pemerintah, TNI, POLRI, dan seluruh stakeholder untuk menanggulangi Karhutla.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara beserta seluruh stakeholder bahu-membahu dalam mengendalikan dan mencegah meningkatnya Karhutla dengan beberapa langkah konkret seperti melakukan patroli rutin pencegahan Karhutla.

“Kami di Kaltara tetap berkoordinasi dengan seluruh stakeholder baik dengan TNI, POLRI, dan masyarakat untuk mencegah Karhutla. Kami sudah membentuk Masyarakat Peduli Api (MPA), dan Brigade Pengendalian (Brgidal) Karhutla hingga ke tingkat desa,” ucap Zainal Paliwang dalam paparannya.

Menkopolkum mengimbau kepada seluruh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, dan seluruh stakeholder untuk saling berkoordinasi menanggulangi Karhutla di tengah ancaman El Nino sehingga titik panas di wilayah Indonesia dapat dikendalikan. (dkisp)



BERSINERGI : Asisten bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si menghadiri Rakor Lintas Sektor Pengamanan Pemilu di Mapolda Kaltara, Selasa (10/10).

Antisipasi Dini Hadapi Pemilu 2024

TANJUNG SELOR - Asisten bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kalimantan Utara (Kaltara), Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Lintas Sektor dalam rangka Pengamanan Pemilu 2024 di Aula Rupatama Kayan Polda Kaltara, Selasa (10/10).

Turut hadir dalam Rakor ini Kapolda Kaltara, Wakapolda Kaltara, Brigjen Pol Kasmudi, S.I.K., KOREM 092/Maharajalila, pejabat utama Polda Kaltara, Bawaslu Kaltara, KPU Kaltara, dan perwakilan Partai Politik.

Pada kesempatan ini, Datu Iqro menyampaikan bahwa Operasi Man-

tap Brata Kayan 2023-2024 adalah rakor untuk menyatukan persepsi dan memantapkan sinergi dalam menghadapi Pemilu di wilayah Provinsi Kaltara, khususnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa melalui rakor ini diharapkan dapat menginventarisir berbagai permasalahan, mengevaluasi kinerja, serta berbagi informasi dan pengalaman. "Diharapkan dapat menghasilkan kerjasama untuk memperbaiki kekurangan yang ada," ujarnya.

Datu Iqro juga menegaskan bahwa rapat koordinasi lintas sektoral dalam rangka kesiapan pengamanan Pemilu 2023-2024 ini merupa-

kan upaya untuk meningkatkan dan memantapkan keterpaduan tugas dan fungsi antar dinas dan instansi, sehingga penyelenggaraan Pemilu dapat berlangsung sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Rapat ini menjadi langkah awal dalam upaya meningkatkan keamanan dan kenyamanan selama proses pemilu di Kaltara serta menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk membantu dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat," pungkasnya. **(dkisp)**

Pengelolaan Keuangan Desa jadi Momen Mendukung Kesejahteraan Masyarakat

TANJUNG SELOR – Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa Tingkat Regional pada Provinsi Kalimantan Utara momentum penting untuk berdiskusi dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Gubernur Kaltara, Dr Yansen TP, M.Si di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Selasa (10/10).

Menurutnya, penyalenggaraan dana desa harus mendukung tentang peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemilihan program seperti penyediaan infrastruktur, pendukung ekonomi maupun peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa tujuan disalurkan dana desa merupakan bentuk komitmen negara dalam melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis.

“Melalui dana desa yang telah tersedia, diharapkan dapat tercipta

pembangunan dan pemberdayaan desa menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera,” ujarnya.

Dengan kewenangan yang diberikan, Wagub berharap pemerintah desa dapat berinisiatif mendorong partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa itu sendiri, termasuk pada peningkatan pendapatan. Tujuannya, agar kesejahteraan di desa dirasakan merata.

Selain itu, pemerintah desa juga diharapkan dapat menyediakan pelayanan publik yang berkualitas di tingkat desa yang diselenggarakan secara profesional, efisien dan efektif, serta transparan dan akuntabel.

Tentunya dengan pemberdayaan dan pemanfaatan dana desa dengan baik, masyarakat akan dapat menikmati hasilnya bersama. “Setelah hampir sepuluh tahun penerapan otonomi desa, kemandirian desa belum menunjukkan peningkatan yang signifikan,” ujarnya

Diketahui, realisasi pendapatan asli

desa menunjukkan tren penurunan. Oleh karena itu, keuangan desa harus dimanfaatkan dengan baik melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang akuntabel.

“Saya mengharapkan pertemuan yang kita laksanakan hari ini bisa menghasilkan pemikiran yang terbaik untuk masyarakat,” ujarnya.

Ia berharap adanya sinergitas mulai dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten hingga ke tingkat desa. Sebagai informasi, pemerintah pusat pada tahun 2023 telah menggelontorkan dana desa sebesar 70 triliun untuk 74.954 desa di 434 se-Indonesia. “Terhusus untuk kita di provinsi Kalimantan Utara, kita telah mendapatkan dana desa sebesar 863,38 miliar untuk 447 desa yang tersebar di 4 Kabupaten,” ujarnya.

Pemerintah, kata Wagub memiliki peran penting dalam melakukan pembinaan dan pemberdayaan serta pengawasan desa melalui perangkat daerah terkait. **(dkisp)**

TOYOTA LET'S GO BEYOND

— Come join us for New Avanza and New Veloz @auto2000_bontang —

LET'S TEST DRIVE!

EZ Deal
Get Your Toyota, Upgrade Your Style

DAPATKAN UNDIAN TEST DRIVE

AUTO2000 BONTANG
Jl. Binger Kalimas No. 2266, Bontang Cak, Bontang Barat
Kota Bontang Kalimantan Timur

Scan QR CODE Test Drive
Pada Aplikasi M-TOYOTA

DOWNLOAD
APLIKASI M-TOYOTA

AUTO 2000
member of ASTRA

Urusan Toyota lebih mudah!



ISTIMEWA

Kawasan Wisata Dewi Belai yang berada di KM 30 Desa Batuah, Kukar.

Desa Batuah Terus Kembangkan Ikon Dewi Belai

TENGGARONG - Memiliki tumbuhan dan buah endemik, rupanya tidak disia-siakan oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara (Kukar). Menjadikannya sektor pariwisata unggulan berbasis pertanian atau agrowisata. Yakni menciptakan Desa Wisata Benua Elai atau Dewi Belai.

Desa Batuah memang diketahui menjadi salah satu desa yang banyak mengembangkan potensi Buah Elai. Sebagian besar petani pun menggejutkannya, baik dari sektor hulu sampai hilirisasinya. Terbukti, sejauh ini sudah ada 3 varietas unggulan Buah Elai yang sudah dikembangkan dan didaftarkan oleh Menteri Pertanian. Masing-masing Lai Batuah (2016), Lai Kutai (2017) dan Lai Mahakam

(2009). Bahkan Lai Mahakam sudah dikenal cita rasanya dimancanegara.

Dewi Belai pun kini terus dikembangkan oleh Pemdes Batuah saat ini. Menjadikannya sebagai ikon pariwisata baru di Kukar secara umum, dan Desa Batuah secara khusus. Terlebih, Desa Batuah yang berada di segitiga emas Kalimantan Timur (Kaltim). Yakni Samarinda, Balikpapan dan Ibu Kota Nusantara (IKN). Berharap dapat menarik kunjungan wisatawan, kelak saat IKN benar-benar beroperasi di Kaltim.

"Kalau konsep ini kita lakukan sama-sama, ada pihak swasta dan pemerintah maka kami menjamin program ini akan berjalan maksimal," ungkap Kepala Desa (Kades) Batuah, Abdul Rasyid.

Rasyid melihat, pentingnya keberadaan dan kehadiran pemkab dalam memberikan dukungan penuh. Mulai dari promosi, pembangunan infrastruktur, dan paling penting dalam kajian pengembangannya. Saat ini, Pemdes Batuah pun sedang mendorong dan mengejar pembangunan infrastruktur menuju lokasi wisata Dewi Belai, yakni di KM 30 Jalan Poros Samarinda-Balikpapan.

"Bahwa lokasi-lokasi wisata yang ada di Desa Batuah, kami ingin infrastrukturnya bagus, salah satunya Dewi Belai ini, kita masukkan ke Musrenbang," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari

Kunjungi Bandung, Desa Batuah Lakukan Orientasi Lapangan Terkait Keterbukaan Informasi Publik

TENGGARONG-Keterbukaan informasi publik, rupanya menjadi salah satu fokus yang ingin ditingkatkan oleh Abdul Rasyid, Kepala Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara (Kukar). Ini pun tampak diseriusi olehnya, dengan melakukan orientasi lapangan langsung ke Desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung, belum lama ini.

Dipilihnya Desa Cibiru Wetan, lantaran desa tersebut berhasil menjadi nomor satu di tingkat nasional, sebagai nominator desa anti korupsi dan penerapan keterbukaan informasi publik. Hal inilah yang menarik Rasyid, untuk bisa diambil ilmunya dan diterapkan oleh perangkat Desa Batuah. "Kalau ada program yang bagus dan sesuai karakteristik di Desa Batuah, tentu bisa kita tiru, sehingga program yang kita laksanakan bisa lebih baik," ungkap Rasyid.

Tak sekadar hanya orientasi lapangan ke Desa Cibiru Wetan saja. Hal konkret pun langsung dikerjakan, salah satunya dengan rapat khusus untuk meninjau kembali hasil kunjungan. Melihat apa saja yang bisa diterapkan di Desa Batuah. Diharap-



ISTIMEWA

Kepala Desa (Kades) Batuah, Abdul Rasyid

kan bisa melebihi pencapaian desa yang berpenduduk 17 ribuan orang tersebut.

Ia pun berharap, rombongan Desa Batuah yang terdiri dari perwakilan Kecamatan Loa Janan, ketua TP PKK Desa Batuah, ketua BPD Desa Batuah, anggota DPRD Kukar, dan perangkat desa lainnya ini, mampu

memberikan warna baru. Tentunya untuk kemajuan Desa Batuah.

"Kalau kita tidak bisa lebih baik dari Desa Cibiru Wetan, minimal kita bisa mengikuti jejaknya," tutup Rasyid. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari

Libatkan Perangkat Desa hingga RT, Kades Batuah Bentuk Tim Pencatatan Aset Desa

TENGGARONG - Tidak hanya melakukan peningkatan dalam hal keterbukaan informasi publik saja yang sedang dikejar oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Batuah. Namun juga terus melakukan perbaikan dalam hal administrasi pencatatan aset desa. Hal ini masih dianggap belum maksimal, dikhawatirkan akan ada aset-aset desa yang tercatat dengan baik.

Kepala Desa (Kades) Batuah, Abdul Rasyid, menjelaskan jika pencatatan aset bagian terpenting untuk mengamankan aset desa. Apalagi aset-aset tersebut diharapkan kedepannya akan menjadi salah satu potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). Karena dikatakannya, aset banyak tidak tercatat dan tidak meng-

hasilkan apa-apa bagi desa.

"Padahal, aset sangat memungkinkan untuk memberikan tambahan sumber keuangan dengan melalui PADes," ungkap Rasyid.

Tak hanya berpotensi menambah pundi-pundi PADes saja, pencatatan dianggap penting untuk dijadikan acuan dalam merencanakan pembangunan desa kedepannya. Contoh kecil saja, aset desa berupa jalan usaha tani jika tidak tercatat dengan baik, maka desa sulit untuk melanjutkan proses pembangunannya.

"Saya ingin di masa kepemimpinan saya, semuanya aset bisa terdata, sehingga akan memudahkan pemerintah melanjutkan pembangunan," lanjutnya.

Maka dari itu, ia pun akan segera membentuk tim percepatan pencatatan aset desa. Isinya ada anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala dusun (kadus) dan ketua Rukun Tetangga (RT) akan merampungkan pencatatan aset, sehingga desa akan bisa mengontrol keberadaan aset.

"Kalau semua sudah tercatat, nanti akan diambil titik koordinat dan akan dimasukkan di peta desa, sehingga akan muda dikontrol melalui website desa," tutupnya. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i

Editor : Nicha Ratnasari

16.400 Nelayan di Kukar Dapat Program Penekanan Dampak Inflasi

TENGGARONG - Program pusat dalam menekan inflasi di daerah, turut menysasar sektor perikanan. Terutama yang berdampak langsung kepada nelayan dan pembudidaya ikan, salah satunya di Kutai Kartanegara (Kukar). Yakni lebih kepada menysasar pemenuhan ongkos produksinya.

Dijelaskan Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar, Asli Husaini, program penekanan inflasi lebih kepada penyaluran uang tunai untuk membeli bahan bakar untuk di-

gunakan oleh para nelayan. Uang tunai tersebutlah yang digunakan untuk membeli BBM subsidi, bukan menambah subsidi BBM yang sudah ada.

"Kalau di pesisir itu bahan bakar solar tetapi nelayan di perairan darat itu yang di sungai itu menggunakan pertalite. Dia akan gunakan uang itu untuk membeli bahan bakar tersebut," ungkap Husaini, Selasa (10/10/2023).

Total ada 16.400 nelayan dan pembudidaya yang sudah menerima program yang dirujuk dari pemerintah

pusat tersebut, dengan menysasar 20 kecamatan di Kukar. Ia menambahkan bantuan senilai Rp 24,6 miliar tersebut, bahwa penyalurannya sudah sejak pertengahan September. Tahap pertama diberikan untuk Juli hingga September, sementara tahap kedua diberikan untuk bulan Oktober sampai Desember 2023. "Berakhirnya nanti 6 bulan kemudian (dua tahap)," tutup Husaini. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



ISTIMEWA

Suasana pertandingan Kejuaraan Dunia Shorinji Kempo International Study Session, di Tokyo, Jepang.

Raih 5 Medali di Tokyo, Wabup Rendi Apresiasi Prestasi Atlet Kukar

TENGGARONG - Prestasi gemilang diperoleh Kontingen Shorinji Kempo Kutai Kartanegara (Kukar), yang membawa nama Indonesia dengan berhasil meraih 5 medali dalam Kejuaraan Dunia Shorinji Kempo International Study Session, di Tokyo, Jepang. Yakni masing-masing dua medali emas, satu perak dan dua perunggu berhasil dikantongi atlet asal Kukar.

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, yang hadir langsung untuk menyaksikan dan memberikan dukungan kepada para atlet Kukar yang berlaga di Tokyo, pun memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Dirinya pun sangat bangga atlet asal Kukar bisa membawa nama harum panji Indonesia di kancah internasional. Rendi menyampaikan bahwa

Pemkab Kukar bakal memberikan penghargaan kepada atlet-atlet yang menoregkan prestasi di Jepang. Bahkan, dirinya pribadi juga ikut memberi penghargaan. "Nanti kita kawal di anggaran 2024 dan penghargaan ini bisa disampaikan. Saya secara pribadi juga memberikan penghargaan untuk uang jajan, nanti dibagi rata saja," ucapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Persaudaraan Shorinji Kempo Indonesia (Perkemi) Kukar, Ahmad Zulfiansyah, pun bersyukur karena atlet Kukar berhasil menorehkan prestasi di kancah mancanegara. Ia menyebut ini menjadi buah dari hasil kerja keras atlet Shorinji Kempo Kukar selama berlatih di Kukar.

"Kita sudah berupaya maksimal, ini hal yang membanggakan dan harus disyukuri," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, ada 33 atlet Shorinji Kempo Kukar yang berlaga di Jepang, didampingi lima official, dan enam pelatih. Rombongan dilepas Sekda Kukar, H Sunggono di Ruang Serba Guna Kantor Bupati Kukar, pada Selasa (3/10/2023) lalu.

Atlet yang mengikuti kejuaraan kempo di Tokyo, Jepang ini juga telah melewati beberapa tahapan-tahapan. Mereka yang berangkat ke Jepang telah lolos pada kualifikasi PON.

Kejuaraan ini sekaligus menjadi ajang peningkatan kualitas para atlet, akan ada sesi belajar selama tiga hari, diikuti pelatih dan para atlet untuk kemudian mengikuti ujian naik tingkat. (adv)

Penulis : Muhammad Rafi'i
Editor : Nicha Ratnasari



MERCURE

HOTEL

SAMARINDA

GASTRONOMY PACKAGE

Nikmati penawaran spesial menginap di ibis Samarinda sambil menikmati hidangan lezat di restoran. Hanya dengan tambahan mulai dari Rp 24 ribu, Anda akan mendapatkan fasilitas sarapan dan kredit voucher F&B sebesar Rp 100 ribu di restoran kami.

Dapatkan diskon 5% untuk anggota ALL serta tambahan 10% untuk anggota Accor Plus.

Berlaku hingga 30 Desember 2023

SCAN BARCODE
UNTUK MELIHAT RATE



Informasi selengkapnya hubungi:

@mercure_samarinda

0811 - 551 - 6000

all.accor.com



PROMO TRAKTIR TEMAN BUY 4 GET 1 FREE

Start From ^{Rp}15.000 nett/person



Nasi Goreng Kampung



Mie Goreng Kampung



Tempe Goreng Tepung



Pisang Goreng Kaya



Teh Tarik Spirit

BEBAS PILIH MENU !

*syarat dan ketentuan berlaku

www.hotelgrandkartika.com/inspirasi



Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman.

Minta Inovasi OPD Terkait Kembangkan Sektor Pariwisata

TANJUNG REDEB - Guna memajukan sektor pariwisata Bumi Batiwakkal, Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman mendorong pemerintah untuk terus melakukan inovasi.

Dia menuturkan, pemerintah harus menggali event-event pariwisata selain Maratua Jazz yang dilaksanakan setiap tahun. "Tetapi manfaatkan juga potensi wisata yang ada di seluruh kecamatan wilayah pesisir selatan," ucapnya.

Dipaparkannya, Berau memiliki beragam potensi wisata. Seperti Bidukbiduk yang memiliki pemandangan

pasir putih dan labuan cermin serta Pulau Kaniungan yang dapat menarik minat wisatawan. "Semua bisa dimanfaatkan, tergantung dari pihak yang menanganinya," tuturnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau harus memiliki inovasi untuk meningkatkan sektor pariwisata yang ada.

"Misalnya membuat agenda maraton dan fun bike di Bidukbiduk, karena memiliki destinasi wisata yang beragam," katanya.

"Karena tidak mungkin yang ikut maraton dan fun bike tidak sekalian berlibur. Pasti akan berlibur dan melihat keindahan Bidukbiduk yang sangat kaya akan destinasi wisatanya," tambahnya.

Kendati demikian, dirinya mengusulkan untuk melibatkan pihak ketiga untuk meringankan beban anggaran untuk kegiatan tersebut. "Berkolaborasi kunci utamanya, agar sektor pariwisata kita semakin berkembang dan terkenal," pungkasnya. (adv/dez)

Tidak Ada Hotel Bintang 5 di Berau, Falentinus Minta Perda Minol Direvisi

TANJUNG REDEB - Masifnya peredaran minuman beralkohol (Minol) di seluruh hotel yang ada disorot Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo. Dia menerangkan, pemerintah telah membuat Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Berau Nomor 11 tahun 2010 tentang larangan peredaran minuman beralkohol.

Dirinya menuturkan, minuman beralkohol dengan Grade B hingga C yang kadar alkoholnya 5 sampai 55 persen hanya boleh beredar di hotel bintang 5. "Padahal di Berau tidak ada hotel bintang 5. Apalagi minol dengan Grade B dan C tidak bisa beredar sembarangan. Terlebih yang Grade A harus diawasi perizinan dan takarannya," ungkapnya.

Falentinus menegaskan, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus maksimal melakukan razia rutin. Jika mendapati minol dengan Grade B hingga C di hotel yang ada, maka wajib ditertibkan. "Waktu itu kami sudah pernah mengusulkan bahwa Perda minol ini direvisi," bebernya.

"Karena ada dampak sanksi sosial kurang baik bagi pengedar dan pihak konsumsi. Karena secara aturan Perda, minuman alkohol grade B hingga C hanya boleh di hotel bintang 5," sambungnya. (adv/dez)



Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo

Madri Minta Pemerintah Usulkan Penerimaan CPNS atau PPPK untuk Masyarakat Berau

TANJUNG REDEB - Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk masyarakat Berau diminta legislatif diusulkan pemerintah.

Ketua DPRD Berau, Madri Pani mengungkapkan, usulan tersebut menyusul dengan adanya rencana penghapusan PTT yang diundur hingga 2024 mendatang. "Dalam pengajuan pemda harus ada keberanian untuk diadakan CPNS dan PPPK, khusus masyarakat Berau," tegasnya.

Ditegaskannya, pemerintah harus mengakomodir PPPK yang sudah diterima. Jangan sampai, kata Madri, yang sudah lulus menjadi tidak lulus.

"Apalagi dalam penerimaan PPPK juga ada syarat berapa lama mengabdikan menjadi PTT. Jadi prioritaskan tenaga honorer yang sudah lama bisa diangkat menjadi ASN sebagai tanda penghargaan dari pemerintah," katanya.

Diperlukan kebijakan pusat supaya hal itu dapat berjalan dengan baik. Sebab, secara signifikan, kata Politikus NasDem ini, perekrutan CPNS dan PPPK dapat mengurangi jumlah tenaga honorer yang ada. "Ke depan perlu diajukan lagi untuk tes CPNS dan PPPK supaya PTT berkurang dan jangan dihapuskan," tutupnya. (adv/dez)



Ketua DPRD Berau, Madri Pani

Penambahan Personel Damkar Terhalang Regulasi, Peri: Cari Solusinya

TANJUNG REDEB - Jumlah personel pemadam kebakaran (Damkar) di Kabupaten Berau masih kurang. Namun, untuk menambahnya terhalang regulasi mengenai rekrutmen Pegawai Tidak Tetap (PTT). Menyoroti persoalan tersebut, Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong mengungkapkan, meski saat ini tidak boleh ada penambahan PTT, pemerintah harus tetap mencari solusi yang tepat.

"Personel pemadam kebakaran ini sangat dibutuhkan dan penting. Harus dicarikan solusinya seperti apa," tegasnya.

Dirinya mengaku siap mengawal, jika usulan penambahan personel damkar masuk dalam rencana anggaran. Sehingga, Peri mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk menyusun perencanaan sesuai kebutuhan tenaga yang dibutuhkan.

"Mengingat wilayah kita ini sangat luas, tentunya setiap pos BPBD di setiap kecamatan harus memiliki jumlah personel yang cukup," tuturnya.

Politikus Gerindra ini menilai, pemenuhan personel Damkar di setiap pos kecamatan sangat penting, agar penanganan suatu kejadian dapat lebih cepat. "Terlebih ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Hal itu memerlukan banyak personel, agar cepat tertangani. Jadi saya kira ini harus jadi suatu perhatian," katanya.

Peri berharap, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dapat segera menangani persoalan keterbatasan personel damkar tersebut dengan maksimal. "Ini kebutuhan urgent, sebaiknya secepatnya dicarikan solusinya. Karena menyangkut dengan penanganan bencana," pungkasnya. (adv/dez)



Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong

Rudi Dorong Adanya Perda Tentang Pengawasan Penggunaan Dana Pendidikan



Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong

TANJUNG REDEB - Persentase anggaran senilai 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai cukup besar.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong mendorong adanya Peraturan Daerah (Perda) terkait pengawasan penggunaan dana pendidikan. "Yang direalisasikan saat ini hanya satu persen saja. Tentu tidak masuk akal. Saya khawatir dunia pendidikan kita sulit maju jika tidak diberikan anggaran sebagaimana mestinya," katanya.

Menurutnya, jika ada Perda terkait pengawasan penggunaan dana pendidikan, masyarakat dapat ikut mengawasi dan mengkritisi. "Jadi masyarakat tahu penggunaannya kemana saja. Kalau tidak sesuai, masyarakat bisa menuntut," tegasnya.

Rudi menilai, minimnya penggunaan anggaran yang direalisasikan untuk sektor pendidikan merupakan

suatu kegagalan visi-misi kepala daerah. "Pemerintah saat ini saya katakan wanprestasi. Karena dari 18 visi misi yang digaungkan, salah satunya soal pendidikan, tapi kenyataannya tidak terbukti bisa lebih baik," bebarnya.

Dirinya menyebut, pendidikan seharusnya diutamakan. Terlebih dalam Undang-Undang termaktub sektor pendidikan harus diberi anggaran lebih. "Itu karena pendidikan suatu hal yang sangat penting. Apalagi menyangkut masa depan bangsa," katanya.

Kendati demikian, Politikus PDI-P ini mengakui pihaknya di Komisi I DPRD Berau akan mengusulkan Perda tentang pengawasan penggunaan dana pendidikan. "Tujuannya supaya pendidikan di Berau sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, apalagi dengan persentase 20 persen. Tahun depan kami usulkan Perda mengenai hal tersebut," pungkasnya. (adv/dez)

Dukung Retail Bina UMKM Berau

TANJUNG REDEB - Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena soroti pembinaan UMKM yang dilakukan oleh retail nasional. Ia mengungkapkan, saat ini ada dua retail nasional, yaitu Indomaret dan Alfamidi sudah cukup baik dalam pembinaan UMKM di Bumi Batiwakkal. "Hal itu bagus, apalagi masuknya retail nasional ini bisa menjadi tanda bahwa daerah kita sudah cukup maju," jelas Darlena.

Politikus Partai NasDem itu mengaku mendukung pelatihan yang dilakukan oleh retail nasional untuk membantu memasarkan dan promosi produk UMKM dari Berau.

"Saya sangat mendukung hal itu, cukup baik untuk membantu UMKM kita," terangnya.

Darlana juga berharap jaringan retail nasional ini tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga bisa menyebar hingga ke pesisir kabupaten Berau. "Saya harap bisa masuk ke pesisir sana. Sehingga ekonomi bisa tumbuh," terangnya.



Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena

Penyerapan tenaga kerja lokal juga diharapkan bisa maksimal. Meski dipahami, ketika baru membuka akan menggunakan tenaga kerja luar untuk mengajarkan dan memberi pemahaman bagi anggota baru.

Namun setelahnya diharap bisa terus memaksimalkan untuk menyerap putra putri Berau. "Kami berharap tenaga kerja lokal kita terserap, putra putri daerah diberdayakan, sehingga tingkat pengangguran bisa berkurang," pungkasnya. (adv/dez)

Saga Apresiasi Pemkab Berau Buat Jalur Baru Masuk Pulau Kakaban



Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga

TANJUNG REDEB - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau membangun jalur baru untuk masuk ke danau ubur-ubur Pulau Kakaban. Hal itu pun diapresiasi jajaran legislatif.

Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga menuturkan, adanya jalur baru itu dapat menjadi opsi ketika musim angin selatan. Pasalnya speedboat kesulitan bersandar jika melalui jalur lama. Selain itu cukup berbahaya dilintasi karena medan yang cukup tinggi dan menurun.

"Sehingga kalau lewat jalur lama ketika musim angin selatan, para gaet atau pemandu wisata kesulitan membawa tamu," tuturnya.

Dijelaskannya, di kawasan Pulau Kakaban ada dua musim, yakni angin utara dan angin selatan. Jika musim angin utara, jalur lama dapat digunakan. Namun, ketika musim angin selatan dapat menggunakan jalur yang baru.

"Tentunya di jalur yang baru kita tetap mementingkan akidah yang berlaku terkait tentang konservasi dan tidak melakukan pengebangan hutan yang berlebihan," bebarnya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut berharap, pembangunan jalan masuk yang baru tetap mengikuti sesuai regulasi konservasi, mengingat wisata Pulau Kakaban telah ditetapkan oleh kementerian sebagai salah satu daerah konservasi.

"Semoga dengan jalur baru ini peningkatan kunjungan wisatawan bisa meningkat dan ekonomi kreatif masyarakat sekitar kawasan bisa ikut terangkat," tandasnya. (adv/dez)

Minta Bonus Atlet Segera Direalisasikan, Subroto: Itu Hak Mereka



Anggota Komisi III DPRD Berau, Subroto

TANJUNG REDEB - Belum kunjung cairnya bonus atlet berprestasi pada perheletan Porpov VII Kaltim beberapa waktu lalu menjadi perhatian Anggota Komisi III DPRD Berau, Subroto.

Dirinya membeberkan, beberapa waktu lalu jajaran Komisi III DPRD Berau sudah melakukan rapat pertemuan dengan KONI guna membahas bonus atlet. "Kami (Komisi III, red) sudah mendesak bonus untuk atler segera direalisasikan, karena itu hak mereka yang sudah beprestasi," ungkapnya.

Dia menyebut, dalam APBD Perubahan tahun 2023 ini seluruh bonus atlet sudah terselesaikan. "Saya harap bisa segera dicarikan," katanya.

Politikus Golkar ini meminta ke depannya, anggaran yang sudah ditetapkan dapat digunakan untuk peningkatan cabang olahraga (Cabor). "Jadi setelah berprestasi tidak menunggu lagi anggaran perubahan atau anggaran baru. Itu harapan kami ke depan ya," ungkapnya.

Pihaknya selaku Komisi III DPRD Berau juga sudah berulang kali sampaikan kepada KONI, agar konsisten beri perhatian menyeluruh kepada cabor. "Yang kami harapkan seluruh cabor dinaungan KONI Berau ini bisa meraih prestasi di kancah nasional. Kemudian soal anggaran untuk cabor kami selalu support dan lakukan pengawasan," pungkasnya. (adv/dez)



Praktik pencurian telur penyu menyita perhatian Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung.

Pencurian Telur Penyu jadi Sorotan Legislatif

TANJUNG REDEB - Masih maraknya pencurian telur penyu mendapat perhatian serius Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung. Menurutnya, peran masyarakat bersama aparat penegak hukum dan Pemkab Berau sangat penting.

"Aparat hukum harus menindak persoalan ini, sebab penyu merupakan satwa yang dilindungi. Apalagi perburuan telur penyu di Berau telah

terjadi," ungkapnya.

Nurung mengaku pelaku pencurian telur penyu bakal dijerat Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya.

"Ditambah keberadaan penyu juga menjadi bagian dari daya tarik wisata Berau. Sehingga seluruh pihak harus menjaga keberadaannya," tegasnya.

Dia meminta Pemkab Berau

melakukan aksi nyata dalam mengatasi persoalan tersebut. Pemkab Berau harus mampu mengajak masyarakat agar turut andil menjaga telur penyu dari aksi pencurian.

"Kalau pemerintah daerah tidak peduli dengan persoalan ini maka akan berat memberantas pencurian telur penyu. Jadi pemerintah harus memberikan kontribusi nyata dalam hal ini," tandasnya. (adv/dez)

Komisi II RDP dengan Bapenda, Optimistis Perolehan PAD 2024 Mendatang Meningkatkan

TANJUNG REDEB - Komisi II DPRD Berau menggelear Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pada Selasa (10/10/2023). Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya menuturkan, rapat itu bertujuan untuk mengetahui bagaimana target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2024 mendatang. "Dalam rapat tersebut, pihak Bapenda sudah memaparkan kepada kami bagaimana target mereka mengenai perolehan PAD kita di tahun depan," jelasnya kepada sejumlah awak media.

Dirinya mengungkapkan, setelah melihat pemaparan Bapenda, pihaknya menyepakati dan mengaku optimistis perolehan PAD pada tahun 2024 akan meningkat. "Bapenda menargetkan PAD kita kurang lebih mencapai Rp 200 miliar. Untuk per September 2023



Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya

ini, target sudah menyentuh angka 81 persen," paparnya.

Wendy juga menyebut, dalam RDP

itu Bapenda menyampaikan beberapa kendala yang terjadi. "Seperti masalah saat penagihan dan yang lainnya," imbuhnya.

Dirinya menjelaskan, enam sektor sumber PAD, seperti pajak daerah, retribusi dan laba dari BUMD serta lainnya. Wendy menyampaikan, salah satu sumber perolehan PAD terbaru dari retribusi sarang burung walet. "Mereka memiliki berbagai macam tantangan dalam memaksimalkan Perolehan PAD tersebut," ucapnya.

Politikus Nasional Demokrat (NasDem) ini berharap, Bapenda sebagai mitra Komisi II DPRD Berau bisa terus berkolaborasi untuk mencapai perolehan PAD untuk Kabupaten Berau semaksimal mungkin. "Tentunya harapan kita PAD ini bisa disalurkan kembali untuk masyarakat Kabupaten Berau," tandasnya. (adv/dez)



AYO IKUTI !!

LOMBA VIDEO PENDEK

TOTAL HADIAH

33

JUTA RUPIAH

TEMA

PERAN PUPR

MENDUKUNG INFRASTRUKTUR

DESTINASI WISATA

Dalam rangka menyambut HUT Kota Bontang yang ke-24 dan mensukseskan Bontang Festival 77 Event. Dengan semangat "Energy of Bontang #sinergyandcollaboration". Dinas PUPR Kota Bontang mengadakan Lomba Video. Lomba ini hadir sebagai upaya Dinas PUPR turut berpartisipasi dalam membangun dan mengembangkan infrastruktur destinasi wisata di Kota Bontang untuk memenuhi nilai-nilai Sapta Pesona (Aman Tertib Bersih Sejuk Indah Ramah Kenangan).

Catat Waktunya :

- 21-27 September 2023 Pendaftaran
- 29 September 2023 (pukul 09.00 wita Seremoni peluncuran lomba video dan pukul 14.00 wita Technical Meeting)
- 30 September 2023 (pukul 06.00 wita Spot Hunting di 3 lokasi
 - Karang Pasilan (Snorkling)
 - Kampung Malahing
 - Pulau Beras Basah
 - + additional : Pulau Segajah
- 12 Oktober 2023 (pukul 20.00 wita pengumuman pemenang secara "live" di acara Gala Dinner HUT Kota Bontang Ke-24 di Pendopo Rujab Walikota)

DAFTAR SEGERA



<https://forms.gle/xCaP8bLjtdAYkhH7>

NARAHUBUNG / CP :

Heny 081254559928
Shinta 082256114744

SYARAT DAN KETENTUAN LOMBA

1. Peserta lomba terbuka untuk umum dengan usia min 17 tahun (kuota terbatas 40 tim)
2. Peserta lomba berkelompok min 3 orang max 4 orang
3. Video merupakan video pendek berjenis video profil infrastruktur pariwisata Kota Bontang berdurasi max 3 menit dengan resolusi video min 1920x1080px
4. Peserta harus mengisi formulir pendaftaran melalui link : <https://forms.gle/xCaP8bLjtdAYkhH7>
5. Video pendek bertema sesuai tema yang di tentukan
6. Peserta lomba hanya mengirim satu video pendek
7. Video belum pernah dilombakan dan dipublikasikan melalui media apapun
8. Video merupakan karya baru, original bukan hasil plagiat/mengambil sebagian hak cipta oranglain, apabila dikemudian hari terdapat gugatan hak cipta maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peserta lomba
9. Transportasi menuju 3 spot lokasi yang ditentukan oleh panitia dalam pengambilan video difasilitasi oleh dinas PUPR hanya 1 (Satu) hari
10. Video mencantumkan subtitle berbahasa Inggris
11. Video yang dikirimkan menjadi hak milik Dinas PUPR Kota Bontang
12. Wajib follow Instagram @ppid.dpuprbtg dan @bontang_tourism
13. Peserta tidak dipungut biaya apapun
14. Video tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, moral, SARA, kekerasan, promosi produk komersial serta tidak mengandung unsur pornografi
15. Materi video dapat diterima panitia paling lambat tanggal 05 oktober 2023 pukul 23.59 wita melalui Email : dpupr25@gmail.com dan ke CP : SHINTA (082256114744)
16. Video yang dikirimkan berhak disiarkan atau ditayangkan oleh panitia untuk keperluan media edukasi dan promosi
17. Keputusan panitia dan dewan juri tidak dapat diganggu gugat
18. Informasi teknis lomba akan disampaikan pada technical meeting
19. Hal-hal yang belum diatur akan diinformasikan berikutnya.



ISTIMEWA

Andi Faizal Sofyan Hasdam saat dilantik jadi Ketua IPSI beberapa waktu lalu.

IPSI Bontang Angkat Andi Faiz Jadi Ketua Periode 2023-2027

BONTANG – Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) resmi mengangkat Ketua DPRD Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam sebagai Ketua IPSI Bontang Periode 2023-2027.

Dihadiri ratusan atlet pencak silat dari 10 perguruan pencak silat di Bontang, Andi Faiz resmi dikukuhkan dan diambil sumpahnya, bersama jajaran pengurus Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) Kota Bontang Periode 2023-2027, di Gedung Disporapar.

Dalam Sambutannya, Andi Faiz mengatakan, sebelum pengukuhan telah digelar beberapa kegiatan dan dilakukan penandatanganan deklarasi kesepakatan bersama ketua dan pengurus dari 10 perguruan pencak silat yang dihadiri sebanyak 7.770 warga pencak silat di Kota Bontang. Pada deklarasi kesepakatan tersebut, ada 2 point penting yang harus

ditanamkan dengan baik.

“Pertama kita harus tunduk dan patuh pada peraturan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) IPSI. Kedua kita harus menciptakan kerukunan dan ketertiban, untuk membawa kebaikan dan kemakmuran di Kota Bontang,” ujarnya.

Tak lupa Andi Faiz juga turut mengucapkan terimakasih atas amanah dan kepercayaan yang diberikan kepadanya dan berharap bisa menjalankan amanah tersebut dengan baik.

“Menjadi Ketua IPSI ke depan, menjadi sebuah proses yang panjang, tentunya akan penuh dinamika. Kenapa saya ingin menjadi Ketua IPSI, karena saya melihat ada 2 aspek di IPSI, pertama prestasi dan sisi sumber daya manusianya,” timpalnya.

Selain itu, dikatakan Andi Faiz bahwa IPSI memiliki sisi prestasi yang harus

didukung dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), dan bagaimana meningkatkan fasilitas sarana prasarananya. Hal ini pun menjadi tantangan bagi dirinya sebagai Ketua IPSI Kota Bontang, bagaimana menciptakan atlet berprestasi yang lahir dari Kota Bontang untuk mewakili Kalimantan Timur.

“Makanya saya mencari tahu apa saja kekurangan-kekurangan di Kota Bontang terkait dengan pencak silat ini,” terangnya.

Di antara perguruan silat yang hadir adalah; Persaudaraan Setia Hati Terate, Tapak Suci Putra Muhammadiyah, Kelatnas Indonesia Perisai Diri, Pencak Silat Cempaka Putih, Pencak Silat Joko Tole, Persinas Asad, IKSPI Kera Sakti, Naga Perta-pa, Pagar Nusa, Persaudaraan Setia Hati Winongo. (al/adv)

Pedagang Keluhkan Mahalnya Biaya Take Over Lapak di Pasar

BONTANG – Parapedagang di pasar tradisional mengeluhkan soal mahalnya biaya balik nama (take over) lapak di dalam pasar. Alhasil banyak pedagang yang memilih berjualan di pinggir jalan.

Hal itu diungkapkan Anggota Komisi II DPRD Bontang, Sumaryono beberapa waktu lalu. Dirinya kerap mendapat keluhan dari pedagang terkait take over lapak.

“Kata pedagang harga balik nama lapak kosong yang mau ditempati pedagang lain, biayanya terlalu tinggi. Sampai-sampai ada yang Rp 10

juta,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Disperindagkop-UKM Kota Bontang, Kamilan menjelaskan, bahwa lapak atau kios yang ada di pasar itu sifatnya adalah hak guna. Bukan atas nama pribadi sehingga tidak bisa diperjualbelikan, sesuai dengan regulasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Bontang yang berlaku.

Adapun para pedagang yang bertempat di pasar seperti di Taman Rawa Indah hanya membayar retribusi sewa ruang sebulan sekali, dengan tarif sewa ruang berkisar Rp

6.750 - Rp 54.000 tergantung luas lapak pedagang.

“Tarif lapak-lapak di pasar itu sudah diatur sesuai Raperda,” terangnya.

Meski demikian Kamilan berjanji akan menindaklanjuti dan mengevaluasi persoalan tersebut, untuk mengantisipasi adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memperjualbelikan lapak tersebut.

“Saya tidak tahu kalau itu ada oknum. Makanya kami akan lihat dan evaluasi lagi. Kalau melanggar Perda akan segera kami tindaklanjuti,” tegasnya. (al/adv)



Atlet Prestasi Kurang Diperhatikan, Pemkot Diminta Buka Peluang Kerja

BONTANG - Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam meminta Pemkot Bontang memperhatikan dunia olahraga di Bontang. Lantaran banyak atlet berprestasi masih kurang mendapat perhatian serius.

Diungkapkan Faiz, banyaknya pencapaian yang diraih para atlet berprestasi di Bontang sering luput dari perhatian pemerintah daerah.

Salah satunya dicontohkan cabang olahraga (Cabor) pencak silat yang bahkan bisa mewakili dan mengharumkan nama Kota Bontang juga Kalimantan Timur di tingkat nasional. Namun mer-

eka justru kesulitan saat mencari kerja di kotanya (Bontang) sendiri.

“Harusnya para atlet-atlet berprestasi ini bisa mendapat peluang kerja. Misalnya, diangkat menjadi pegawai TKD dilingkup Pemkot Bontang, atau diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui jalur atlet berprestasi,” ujarnya.

Tidak hanya bonus, pemberian peluang kerja ini juga diperlukan sebagai jaminan masa depan para atlet. Maka itu diperlukan perhatian pemerintah dalam menjalin komunikasi yang baik utamanya bagi semua cabor.

“Hal ini memang perlu disuarakan, agar para atlet juga merasa diperhatikan sama pemerintah. Tak hanya sekedar bonus prestasi, tapi ada jaminan bagi mereka (atlet) ini di masa depannya,” timpalnya.

Politikus Partai Golkar ini pun ke depan berencana bakal memanggil para atlet berprestasi di Kota Bontang, untuk mendengar apa yang menjadi keinginan mereka kepada pemerintah “Kami (DPRD) akan mengkomodir hal-hal yang disampaikan para atlet-atlet berprestasi ini,” pungkasnya. (al/adv)



Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Laisa Hamisah

DPRD Balikpapan Soroti Maraknya Toko Retail Modern

BALIKPAPAN-Toko modern dalam beberapa bulan terakhir ini bermunculan di sejumlah sudut Kota Balikpapan hingga mendekati pemukiman penduduk. Bahkan jumlahnya terus bertambah tiap kawasan.

Tentunya hal ini pun akan berdampak kepada para toko kelontongan. Hal ini pun akhirnya mendapat perhatian serius dari DPRD Kota Balikpapan.

Ketua Komisi I DPRD Kota Balikpapan, Laisa Hamisah mengatakan, maraknya toko modern di Kota Balikpapan memang bisa memberikan dampak positif, namun ada dampak lainnya juga, yang dapat berpengaruh terhadap penurunan perekonomian masyarakat khususnya pelaku usa-

ha toko tradisional.

"Kami sangat menyoroti masalah itu, karena masyarakat yang berjualan toko kelontongan akan sedikit banyak terganggu perekonomiannya," ujarnya Selasa (10/10/2023).

Laisa menjelaskan, toko retail modern diakui dioperasikan melalui manajemen perusahaan yang lebih rapih dan menyiapkan berbagai kebutuhan masyarakat. Hal ini memang lebih baik dari pada toko kelontongan. Namun Laisa menilai bahwa toko kelontongan menjadi penopang keekonomian masyarakat juga.

"Jangan sampai dibiarkan terus menjamur. Mudah-mudahan kami dari Komisi I DPRD Kota Balikpapan

bisa membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait menjamurnya toko modern," jelasnya.

Laisa menyampaikan, kemungkinan besar akan ada pembatasan jumlah toko modern, ini untuk mencegah invasi toko modern yang dikhawatirkan akan melumpuhkan ekonomi masyarakat yang ditopang dari toko kelontongan.

"Saya pikir di Balikpapan belum ada (aturan) itu. Kasihan masyarakat yang membuka warung kalau sedikit-sedikit, di mana-mana ada itu," tutupnya. (ADV/DPRD Balikpapan/Bom)

Pewarta : Aprianto

Editor : Nicha Ratnasari



Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi, narasumber, jajaran panitia dan peserta saat sesi foto bersama peserta pada pembukaan pelatihan PBJP, Senin (9/10/2023).

BPSDM Kaltim Kembali Gelar Pelatihan Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

SAMARINDA - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menggelar Pelatihan Uji Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level 1 Angkatan 5 Tahun 2023 bagi Aparat Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.

Kegiatan yang digelar di Gedung Aula Utama BPSDM Kaltim, Jalan HM Rifadin Samarinda Seberang, pada Senin (9/10/2023), dilaksanakan secara blended learning (tatap muka dan online) selama 10 hari secara e-learning (online) mulai 25 September hingga 6 Oktober 2023 lalu.

Kemudian, tatap muka selama 3 hari mulai 9 - 11 Oktober 2023.

Dalam sambutannya sekaligus membuka acara, Kepala BPSDM Kaltim, Nina Dewi mengucapkan terima kasih kepada semua peserta yang telah meluangkan waktu dan upaya untuk menghadiri pelatihan ini.

"Semangat belajar Bapak dan Ibu adalah langkah pertama menuju pemahaman yang lebih baik tentang pengadaan barang jasa," katanya.

Dia juga berharap kepada peserta agar dapat mengikuti pelatihan dengan sebaik-baiknya dan memanfaatkan pelatihan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan ten-

tang PBJP.

"Kepada peserta, saya mohon agar dapat mengikuti pelatihan ini dengan seksama dan memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya kepada narasumber. Mari kita gunakan waktu kita dengan bijak selama pelatihan ini dan terbuka untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan sesama peserta. Saya yakin bahwa kita semua akan keluar dari pelatihan ini dengan pengetahuan baru yang berharga," tutupnya. (ADV)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
DINAS KESEHATAN



<http://dinkes.kaltimprov.go.id>

Dr. Sri Wahyuni MPP
SEKDA PROV. KALTIM

Dr. Akmal Malik, M.Si
PD GUBERNUR KALTIM

dr. H. Jaya Mualimin, Sp.KJ, M.Kes, MARS
KEPALA DINAS KESEHATAN KALTIM

Rapim bersama Pj Gubernur, Jaya Ajukan Program Layanan Kesehatan Ibu dan Anak Stunting

SAMARINDA- Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Timur (Kaltim) Jaya Mualimin mengatakan pihaknya tengah mengajukan beberapa program rencana pembangunan bidang kesehatan, khususnya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan keluarga ibu dan anak pada rapat pimpinan bersama pejabat gubernur.

"Kami melaporkan beberapa indikator kesehatan yang menjadi prioritas, seperti angka kematian ibu dan anak, persalinan di fasilitas kesehatan (faskes), pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, dan stunting," jelas Kepala Dinkes Kaltim Jaya Mualimin, Selasa (10/10/2023).

Jaya juga menyatakan, stunting yang menyebabkan kekerdilan pada anak merupakan salah satu masalah kesehatan perlu mendapatkan perhatian serius, karena mempengaruhi perkembangan fisik dan mental anak.

"Stunting pada 2022 angkanya naik dari 22,8 persen menjadi 23,2 persen. Angka ini agak lebih tinggi di atas rata-rata nasional. Makanya kami berharap dengan program ini bisa menurunkan angka stunting menjadi 21,4 persen pada tahun 2023 dan 12,83 persen pada akhir 2024," imbuhnya.

Lebih lanjut, pihaknya sedang menunggu hasil survei kesehatan yang akan dirilis dalam waktu dekat. Survei ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kondisi kesehatan masyarakat Kaltim.

"Kami berharap survei ini bisa memberikan informasi yang valid dan terpercaya, sehingga kami bisa mengevaluasi dan meningkatkan program-program kesehatan yang sudah ada," tutupnya. **(Nta/adv/Dinkes)**

Pewarta : *Ernita*
Editor : *Nicha Ratnasari*



ISTIMEWA

Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Dr
Jaya Mualimin

Persiapan IKN, Dinkes Kaltim Bakal Penuhi Kebutuhan SDM Rumah Sakit Sepaku

SAMARINDA- Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah mempersiapkan fasilitas kesehatan yang ada di Ibu Kota Nusantara (IKN). Di kawasan Sepaku saat ini hanya ada satu Rumah Sakit kelas D, dan ada 5 Puskesmas.

"Kami masih terus berbenah untuk fasilitas kesehatan yang ada di sana. Apalagi untuk menyambut IKN, tentu seperti rumah sakit kelas D akan menjadi kelas C," ungkap Kepala Bidang Fasyankes Dinas Kesehatan Kaltim Dr Rony Setiawati, Selasa

(10/10/2023).

Pemerintah daerah pun tak hanya menyerahkan ke Kementerian Kesehatan, tetapi juga menyiapkan anggaran untuk membantu rumah sakit yang berada di IKN, dalam program Major Project. "Ya jadi major project itu merupakan program gubernur Kaltim pimpinan Isran-Hadi. Di mana, dalam program tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu fasilitas kesehatan," bebernya.

Diketahui, anggaran sarana prasarana telah disiapkan sebesar Rp10 miliar se-Kaltim, dari 2024-2026. Akan

tetapi dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk daerah IKN belum mencukupi. Sedangkan, sarana prasarana seperti tempat tidur pasien rumah sakit belum memenuhi, dan akan ditingkatkan sebelum tahun 2024.

"Untuk upaya dinas kesehatan Kaltim sendiri, tentu terkait penyediaan SDM, sarana prasarana harus dipenuhi semua," pungkasnya. **(Nta/adv/Dinkes)**

Pewarta : *Ernita*
Editor : *Nicha Ratnasari*

Angka Stunting di Kaltim Tinggi, Dinkes Lakukan Pantauan Gizi D/S

SAMARINDA- Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) membahas peningkatan capaian program gizi dengan istilah D/S. D adalah jumlah balita yang ditimbang dan S adalah jumlah semua balita yang berada di wilayah kerja.

"Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemantauan kesehatan bayi dan balita melalui kegiatan posyandu," ungkap Sub Koordinator Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kaltim Muhammad Maulana Fahmi, Senin (9/10/2023).

Fahmi mengatakan, pemantauan pertumbuhan adalah salah satu kegiatan utama program dalam perbaikan gizi, yang menitikberatkan pada upaya pencegahan dan peningkatan keadaan gizi anak.

Dikemukakannya, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Kementerian Kesehatan tahun 2022, prevalensi balita stunting di Kaltim mencapai 23,9 persen, menempati peringkat ke-16 tertinggi secara nasional.

Untuk angka tersebut masih tergolong tinggi, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang menetapkan batas aman prevalensi stunting maksimal 20 persen.

"Kami ingin menurunkan angka stunting di Kaltim, khususnya di wilayah calon ibu kota baru dan sekitarnya," jelasnya.

Fahmi juga menjelaskan, pemantauan status gizi pada balita dilakukan dengan memanfaatkan data hasil penimbangan posyandu setiap bulan berdasarkan indikator SKDN,

di mana S adalah sasaran balita di suatu wilayah, K artinya balita yang memiliki Kartu Menuju Sehat (KMS), D yaitu balita yang ditimbang berat badannya, dan N adalah balita yang ditimbang dan naik berat badannya.

"Kami juga ingin meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat di Posyandu," bebernya.

Sementara itu, pertemuan peningkatan capaian D/S tingkat provinsi itu berlangsung dari tanggal 9-11 Oktober 2023. Diikuti oleh 33 peserta yang terdiri dari 20 peserta dari kabupaten/kota dan 13 peserta dari provinsi. Peserta berasal dari lintas sektor dan lintas program Dinas Kesehatan Kaltim. (Nta/adv/Dinkes)

Pewarta : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari



MEDIA KALTIM

Kepala Bidang Fasyankes Dinas Kesehatan Kaltim Dr Rony Setiawati.

Seluruh Puskesmas Se-Kaltim Wajib Terakreditasi

SAMARINDA- Ada sebanyak 188 Puskesmas yang ada di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, masih tersisa 6 Puskesmas yang belum memiliki akreditasi.

Kepala Bidang Fasyankes Dinas Kesehatan Kaltim Dr Rony Setiawati mengatakan, sejak tahun 2022 seluruh fasilitas kesehatan diwajibkan memiliki akreditasi. Sehingga masih ada 6 puskesmas dari 188 yang belum terakreditasi.

"Kementerian kesehatan membentuk 13 lembaga yang akan menilai puskesmas tersebut. Dan di tahun ini akan ada 4 puskesmas yang akan diakreditasi," jelas dr Rony Setiawati, Selasa (10/9/2023).

Lebih lanjut, untuk pembiayaan akreditasi akan dibebaskan kepada pemerintah kabupaten/kota. Di mana jika sebelumnya, biaya akreditasi dibebankan kepada pemerintah pusat.

"Nantinya akan ada 5 penilaian untuk akreditasi, seperti paripurna, utama, madya, dan dasar. Jadi tidak ada puskesmas yang tidak lolos akreditasi, hanya saja penilaian setiap puskesmas berbeda," tutupnya. (Nta/adv/Dinkes)

Pewarta : Ernita

Editor : Nicha Ratnasari



Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka DPK Kota Samarinda, Edy Wahyudi.



Pustakawan Ahli Madya DPK Kota Samarinda Nurhikmah

DPK Kota Samarinda Akan Sosialisasi Pentingnya Naskah Kuno

SAMARINDA - Demi menyelamatkan naskah kuno, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Samarinda akan menggelar sosialisasi kepada masyarakat.

Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka DPK Kota Samarinda, Edy Wahyudi mengatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi tentang naskah kuno agar naskah-naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat bisa dibantu untuk dilestarikan.

"Sementara ini kita akan sosialisasi soal naskah kuno, karena kita belum mengkaji ini. Jadi langkah awal kita akan sosialisasikan, setelah terkumpul informasinya kita akan kunjungi," ujarnya kepada Mediakaltim.com Selasa (10/10).

Diketahui naskah kuno adalah naskah yang bertuliskan isi sejarah, ramuan tradisional, agama dan lainnya yang berumur di atas 50 tahun dan ditulis menggunakan tangan.

Edy Wahyudi mengatakan naskah

kuno dengan usianya yang sangat berumur tentunya sangat rentan rusak. Untuk itu, DPK Kota Samarinda mengimbau masyarakat yang memiliki naskah kuno untuk menyerahkannya kepada DPK Kota Samarinda sebagai upaya melestarikan naskah kuno yang dimiliki masyarakat.

"Naskah kuno yang dimiliki masyarakat boleh dititipkan ke DPK Kota Samarinda untuk dilestarikan. Kami akan alih mediakan dan kita akan berikan sertifikat kepemilikan naskahnya. Tapi kalau masyarakat tidak berkenan dititipkan, maka kami mengajarkan cara merawatnya, karena menjaga naskah kuno itu tidak sembarangan," ungkapnya.

Sementara itu Pustakawan Ahli Madya DPK Kota Samarinda Nurhikmah, menyebutkan selama ini belum ada penggalian informasi terhadap naskah kuno yang ada di Samarinda. Oleh sebab itu, pihak DPK Kota Samarinda akan menggali informasi tentang keberadaan naskah kuno

yang dilaporkan masyarakat ke DPK Kota Samarinda.

"Nah kita dapat informasi ada Alquran kuno di Masjid Shiratal Mustaqiem, Samarinda Seberang dan naskah yang ditulis di atas daun lontar dimiliki masyarakat. Kami belum punya tim ahli untuk meneliti berapa umur dari Alquran kuno tersebut. Oleh sebab itu m, kita akan kerjasama dengan Perpustakaan Nasional untuk melihat apakah ini benar kategori naskah kuno atau bukan," ujarnya.

Naskah kuno ini sangat penting diawetkan dan dilestarikan agar bisa dipelajari oleh generasi saat ini dan generasi mendatang.

"Tentunya ini akan dijadikan sejarah, agar generasi akan datang bisa tau bahwa sejarah ditempat kita ada naskah kuno nya," tutupnya. (ADV)

Pewartu : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka DPK Kota Samarinda, Edy Wahyudi.

Upaya Tingkatkan Literasi, DPK Kota Samarinda Cetak Guru sebagai Penulis Buku

SAMARINDA - Banyak cara agar meningkatkan budaya literasi di tengah-tengah masyarakat, salah satunya adalah dengan cara menulis. Karenanya, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Samarinda mencetak para penulis buku baru serta memfasilitasi penulis tersebut menerbitkan buku dengan tema kekhasan Kota Samarinda.

Kepala Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Pustaka DPK Kota Samarinda, Edy Wahyudi, mengatakan pihaknya telah berupaya untuk mencetak para penulis dan memfasilitasi para penulis Samarinda untuk membuat karya tulis berupa buku.

Untuk mencari orang yang berpotensi bisa menulis ini, DPK Samarinda bekerjasama dengan Kepala SDN 007 Samarinda Ulu, Sri Mulyati sebagai koordinator untuk mencari guru yang berpotensi.

"Jadi kita menggandeng tim penggerak guru yakni Ibu Guru Sri Mulyati yang mencari guru potensial. Sri Mulyati ini Kepala SDN 007 Samarinda Ulu dan sudah kandidat doktor. Selain itu beliau ini juga Dosen FKIP Unmul jadi potensi menulis beliau ini tinggi. Makanya, beliau lah menjadi pemimpin guru penggerak untuk

menghimpun guru yang bisa menulis dan kemudian dicarikan mentor nya oleh DPK Samarinda agar bisa dilatih cara menulis," beber Edy.

Kegiatan menulis buku ini sudah dilakukan sejak Juli lalu, dengan guru ditingkat SD dan SMP yang telah ditetapkan untuk membuat tulisan entah itu berupa karya sastra, Artikel dan Cerita Pendek (cerpen) yang semuanya berkaitan dengan ciri khas kota Samarinda.

"Dalam dua bulan proses pembuatan buku, akhirnya 15 buku sudah selesai ditulis tinggal menunggu perizinan ISBN (International Standard Book Number, read)" pungkasnya.

Saat ditanya soal judul, Edy tidak merinci karena beliau menunggu keluarnya izin buku yang masih dalam proses perizinan di ISBN dan buku yang telah selesai dicetak dan menunggu perizinan ISBN.

"Temanya kita belum tahu ya, tapi yang pasti buku yang sudah selesai cetak ada 15 buku. Intinya berisi soal khas Samarinda, misalkan soal kue khas Samarinda, soal Mahakam dan lain-lain," ujarnya.

Program penulisan buku bertema khas Kota Samarinda ini bertujuan agar hal-hal yang menjadi ciri khas kota Samarinda bisa lebih banyak

dikenal oleh masyarakat di luar kota Samarinda.

"Apa lagi kita mau IKN kan, nanti kalau orang banyak datang kesini pasti bertanya buku soal Samarinda, mana buku-buku yang ditulis oleh penulis Samarinda, karena selama ini kita hanya belajar buku dari luar," katanya.

Alasan kenapa guru-guru yang dipilih sebagai penulis bukunya, kata Edy karena banyak potensi menulis dari guru-guru saat ini yang belum tergali. Oleh sebab itu, pihak DPK Kota Samarinda membantu proses pengembangan potensi menulis guru-guru ini.

"Tahun lalu kita fasilitasi Pelajar SMA untuk buat buku, untuk tahun ini kita ambil dari guru-guru dan tahun depan kita akan cetak penulis dari mana lagi akan kita rapatkan kembali," jelasnya.

Setelah selesai perizinan ISBN-nya, pihak DPK Kota Samarinda akan meluncurkan 15 buku tersebut di kantor DPK Kota Samarinda. "Mudah-mudahan November sudah selesai dan bisa kita luncurkan," pungkasnya. (ADV)

Pewarta : Hanafi

Editor : Nicha Ratnasari



Widya Astuti & Andika Arifin - Pelajar SMK Medika Samarinda

Eksistensi Perpustakaan dari Kacamata Gen Z

SAMARINDA - Di tengah kecanggihan teknologi dan banyaknya koleksi e-book, membaca buku di perpustakaan masih menarik minat Gen Z. Hal ini pun terlihat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang mayoritas dikunjungi oleh pelajar dan mahasiswa.

Seperti yang dilakukan Widya Astuti dan Andika Arifin, pelajar SMK Medika Samarinda yang tengah berkunjung ke DPKD Kaltim.

Siang itu, Widya dan Arifin berniat untuk mencari bahan bacaan guna mengerjakan tugas sekolah atau sekadar menyisihkan waktu luang untuk membaca buku.

"Kami ditugaskan untuk mengulas buku novel. Nah, novel yang kami pilih adalah novel bertema horor, karena lebih menarik", ucap Widya dan dibenarkan Arifin.

Menurut Widya, saat ini banyak bacaan berupa buku digital, tapi muatan ilmu pengetahuannya kurang lengkap. Oleh sebab itu, Widya dan Arifin ini memilih keperpustakaan Kaltim untuk mencari buku fisik karena di dalam buku fisik itu lebih lengkap dan ada daftar pustaka dan rujukan yang lainnya", ungkapnya.

Selain itu Widya berharap untuk pelajar-pelajar yang lain untuk memanfaatkan perpustakaan Kaltim, untuk

meningkatkan budaya literasi agar tidak tergantung dengan media sosial.

"Penting adanya perpustakaan untuk meningkatkan literasi, karena di internet pun informasi belum tersaring banyak berita hoax", ujar siswi kelas 12 SMK Medika ini

Widya juga mengungkapkan bahwa lebih nyaman membaca buku di perpustakaan. Terlebih lagi fasilitas yang telah disediakan oleh DPKD Kaltim juga lengkap. "Yuk kesini kita manfaatkan fasilitas yang ada disini untuk menambah wawasan kita", ajaknya. (ADV)

Pewartu : Desy Alvionita
Editor : Nicha Ratnasari



Pertama Di Indonesia, PLN Produksi Green Hydrogen 100 Persen Dari EBT Kapasitas 51 Ton Per Tahun

JAKARTA - PT PLN (Persero) melalui subholding PLN Nusantara Power (PLN NP) meresmikan Green Hydrogen Plant (GHP) pertama di Indonesia yang berlokasi di kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang, Pluit, Jakarta, Senin (9/10). GHP ini 100 persen bersumber dari Energi Baru Terbarukan (EBT) dan mampu memproduksi 51 ton hidrogen per tahun.

Green hydrogen (hidrogen hijau) merupakan sumber energi bersih yang hanya mengeluarkan uap air dan tidak meninggalkan residu di udara atau menambah emisi karbon gas rumah kaca.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yudo Dwinanda Priaadi menjelaskan hidrogen hijau merupakan bahan bakar alternatif masa depan. Hidrogen hijau menjadi salah satu pilar utama dalam transisi energi untuk mencapai target Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060.

"This is true breakthrough! Yang

dilakukan PLN ini terobosan luar biasa. Ke depan, hidrogen hijau ini adalah game changer dalam transisi energi. Pemerintah komit untuk mengembangkan ini dan terus melakukan kajian dan rumusan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mendorong hidrogen hijau ini berkembang di Indonesia," ujar Yudo dalam sambutannya.

Yudo juga menambahkan Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan hidrogen hijau. Negara tetangga, Singapura bahkan telah menyatakan kebutuhan hidrogen hijau dan akan menyerap produksi dari Indonesia.

"Nantinya pengembangan harus terus dilakukan seperti membangun storage nya. Kebutuhan atas hidrogen hijau akan terus berkembang," ujar Yudo.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan GHP ini merupakan hasil inovasi yang terus dilakukan PLN dalam menjawab tantangan transisi energi. Salah satu kegunaan hidrogen adalah untuk bahan

bakar transportasi. Menurutnya, era masa depan transportasi tak hanya bergerak ke arah listrik namun juga ke arah hidrogen. Maka, PLN sebagai key player dalam transisi energi terus berpacu dalam menyediakan energi bersih bagi masyarakat.

"Ini merupakan wujud nyata dari kolaborasi bersama Kementerian ESDM. Karya Inovasi ini kami lakukan dalam menjawab transisi energi. Memaksimalkan existing facility yang ada di PLTGU Muara Karang, kemudian kami lakukan inovasi dengan memanfaatkan 100% EBT menjadi green hydrogen," tegas Darmawan.

GHP besutan PLN Nusantara Power diproduksi dengan menggunakan sumber dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang terdapat di area PLTGU Muara Karang. Selain dihasilkan dari PLTS yang terpasang, hidrogen hijau ini juga berasal dari pembelian Renewable Energy Certificate (REC) yang berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang.

Dari total produksi hidrogen 51

ton per tahun, sebesar 43 ton dapat dimanfaatkan untuk 147 mobil menempuh jarak 100 km setiap hari.

“Jika saat ini emisi 10 kilometer kendaraan BBM sebesar 2,4 kg CO₂, maka dengan menggunakan green hydrogen yang emisinya 0, artinya bisa menghindarkan emisi sebesar 1.920 ton CO₂e per tahun,” ucap Darmawan.

Selain untuk kendaraan, hidrogen ini juga dapat dimanfaatkan pada sektor industri seperti pembuatan baja, produksi beton, serta pembuatan bahan kimia dan pupuk.

Direktur Utama PLN Nusantara Power, Ruly Firmansyah menyampaikan arah perusahaan dalam produksi gas yang ramah lingkungan ini.

“Pengembangan hidrogen hijau menjadi salah satu alternatif dalam usaha bersama mengurangi gas rumah kaca. Peresmian hidrogen hijau pertama di Indonesia ini kami harapkan dapat menjadi pionir dan memunculkan banyak hidrogen hijau di penjuru nusantara”, terang Ruly.

Pemanfaatan hidrogen hijau ini



akan memudahkan berbagai sektor industri yang sulit dielektrifikasi seperti industri baja, penerbangan, kendaraan berat, dan perkapalan.

“GHP di UP Muara Karang ini adalah sebuah starting point. Ke depan,

kami berencana untuk mereplikasi ke pembangkit PLN Nusantara Power yang memiliki hydrogen plant di pulau Jawa. Sehingga potensi yang dihasilkan akan mencapai sekitar 150 ton per tahun,” tambah Ruly.

LET'S GO **ALYOWO!**

SPESIAL PROMO GANTI OLI MESIN

* TOYOTA MOTOR OIL

Khusus Taxi Online & Travel

Informasi - Call/WA :

Adi S : 0822-5435-0088

Brosur Toyota lebih mudah!

member of ASTRA



TERVERIFIKASI



DEWANPERS

Lebih Dekat *Satu Klik*



KETUA DPRD KABUPATEN PASER

H. HENDRA WAHYUDI, ST

**CERMAT
KOMUNIKATIF**



Bangun Kerjasama dengan DPRD Paser, Media Kaltim Kenalkan Produk Koran Digital Gratis

PASER - Rangkaian Partnership Trip Manajemen Media Kaltim Group terus berlanjut. Kali ini rombongan tiba di Kabupaten Paser.

Selasa (10/10/2023), CEO Media Kaltim, Agus Susanto, Direktur Media Kaltim, Rini Ernawati, bersama Kepala Biro Penajam Paser Utara, Kepala Biro Paser serta Jurnalis Radar Ibukota mengunjungi Ketua DPRD Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi. Rombongan ditemui dan disambut ramah politisi PKB ini di rumah jabatan Ketua DPRD Paser.

Adapun tujuannya, dijelaskan Agus Susanto, selain memperkuat jalinan kerjasama, pertemuan ini juga sebagai langkah awal kemitraan yang baik antara DPRD Kabupaten Paser dengan Media Kaltim maupun secara personal.

"Kegiatan ini sebagai ajang sila-

turahkan dengan para tokoh dan pejabat, termasuk di Kabupaten Paser. Alhamdulillah, hari ini kami sampai di Paser dan diterima Pak Hendra Wahyudi," kata Agus membuka pertemuan.

Lebih rinci, Agus menjelaskan bahwa Media Kaltim baru menginjak usia 3 tahun. Dari perjalanannya, Media Kaltim Group telah mendapat banyak kepercayaan menjadi salah satu media yang menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak.

Sehingga, harapan yang sama turut diharapkan dapat terjalin salah satunya di Kabupaten Paser. Tentunya, e-paper atau koran digital, menjadi salah satu produk khas Media Kaltim Group yang bisa dinikmati gratis setiap hari, termasuk telah beredar di Paser.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabu-

paten Paser, Hendra Wahyudi menyatakan, terima kasih atas kunjungan Media Kaltim Group di Kabupaten Paser. Harapannya, kehadiran Media Kaltim dapat berperan penuh dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat.

"Semoga Media Kaltim terus sukses dalam mendukung perkembangan kemajuan Kabupaten Paser di bidang informasi publik," katanya.

Pada momen itu, Agus Susanto menyerahkan kenang-kenangan berupa poster Hendra Wahyudi dengan konsep cover e-paper Media Kaltim. Cover itu turut bertuliskan karakter Ketua DPRD Kabupaten Paser yang cermat dan komunikatif yang dipadu dengan foto bersama.

*Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari*



Media Kaltim Bangun Sinergi dengan Tokoh dan Pejabat di Kabupaten Paser

PASER - Dalam rangkaian Partnership Trip Manajemen Media Kaltim Grup yang berlangsung di Kabupaten Paser, CEO Media Kaltim, Agus Susanto dan rombongan, melakukan pertemuan dan berdialog dengan beberapa pejabat dan tokoh penting.

Di antara tokoh dan pejabat yang ditemui Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Paser, Fauzan, Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kaltim, Tri Heriyanto, dan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Paser periode 2014-2019, Eka Yusda Indrawan.

Pertemuan berlangsung di Kantor Bawaslu Kabupaten Paser dan merupakan momen yang penuh nostalgia bagi Agus Susanto dan para tokoh tersebut. Sebelumnya Agus Susanto pernah bersama-sama satu

lembaga di Bawaslu.

Agus pernah menjabat sebagai Anggota Panwaslu Bontang Periode 2015 dan periode 2017 ketika lembaga ini masih bersifat ad-hock. Agus juga pernah menjabat sebagai Anggota Bawaslu Bontang periode 2018-2023.

Selain bernostalgia, Agus Susanto juga menggunakan kesempatan ini untuk menjelaskan rencana Media Kaltim Group ke depan. Ia berharap bahwa pertemuan tersebut akan membuka pintu untuk kerjasama dengan berbagai pihak.

"Selain memperkuat jalinan silaturahmi. Semoga ada juga hal-hal yang bisa dikerjasamakan," ujar Agus Susanto pada Selasa (10/10/2023).

Lebih rinci, Agus menjelaskan bahwa Media Kaltim baru menginjak usia 3 tahun. Dari perjalanannya, Media

Kaltim Group telah mendapat banyak kepercayaan menjadi salah satu media yang menjalin kerjasama dengan sejumlah pihak.

Sehingga, harapan yang sama turut diharapkan dapat terjalin salah satunya di Kabupaten Paser. Tentunya, e-paper atau koran digital, menjadi salah satu produk khas Media Kaltim Group yang bisa dinikmati gratis setiap hari tanpa iuran reguler.

Pada momen itu pula, Agus Susanto menyerahkan kenang-kenangan berupa kaos HUT Media Kaltim yang baru dirayakan pada Agustus 2023 lalu. Selain membagikan kenang-kenangan, mantan Komisioner Bawaslu Bontang ini juga mengabadikan momen kebersamaannya.

*Pewarta : Bhakti Sihombing
Editor : Nicha Ratnasari*



ISTIMEWA/YAHYA/MEDIA KALTIM

Pelaksanaan Posbindu di Kodim 0908/Bontang.

Hindari Penyakit Tidak Menular, Ketua Persit Kodim Bontang Adakan Posbindu

BONTANG - Dalam rangka pencegahan dan mengendalikan Penyakit Tidak Menular (PTM), Ketua Persit KCK Cabang XX Kodim 0908/Bontang Dian Priyo Handoyo bersama Puskesmas Bontang Utara I kembali menggelar kegiatan Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) bertempat di Ruang Menur II Kodim 0908/Bontang pada Selasa (10/10/2023).

Ketua Persit KCK Cabang XX Kodim 0908/Bontang, Dian Priyo Handoyo mengatakan Posbindu dilaksanakan dalam upaya pencegahan dini risiko PTM. Yakni, dengan memeriksa secara rutin timbangan berat badan, tinggi badan, lingkaran perut, pengukuran tekanan darah, kolesterol, asam urat hingga diabetes.

"Kegiatan Posbindu ini salah satu upaya dalam pencegahan dini risiko penyakit tidak menular yang dilaksanakan secara rutin setiap bulan.

Pemeriksaan kesehatan dilakukan semua serta pemberian konsultasi," kata Dian Priyo Handoyo.

Dirinya menambahkan pelaksanaan Posbindu sebelumnya bertepatan dengan kegiatan pekan pelayanan KB serentak dalam rangkaian menyambut HUT TNI ke-78.

"Kebetulan pada 4 Oktober lalu bertepatan kami masih ada kegiatan pekan pelayanan KB serentak dalam rangka Hari Kontrasepsi Sedunia TA 2023 dan menyambut HUT TNI ke-78 tahun 2023, sehingga pelaksanaan kegiatan Posbindu baru bisa kami laksanakan pada hari ini," jelasnya.

Hal lainnya, Dian mengatakan kegiatan Posbindu merupakan program rutin dari komando atas yang bertujuan untuk mengetahui perkembangan kesehatan anggota personel TNI, PNS dan anggota Persit di wilayah Kodim 0908/Bontang.

"Diharapkan dengan adanya kegiatan ini dapat memberikan pandangan kepada anggota dan ibu-ibu Persit Kodim 0908/Bontang untuk mengetahui penyakit yang ada di dalam diri masing-masing," terangnya.

Di akhir kegiatan, Dian berterima kasih kepada seluruh anggota TNI, PNS dan anggota Persit KCK Cabang XX Kodim Bontang yang telah ikut berpartisipasi pada pelaksanaan Posbindu.

"Terima kasih kepada Prajurit TNI, PNS maupun anggota Persit KCK Cabang XX Kodim 0908/Bontang yang telah aktif ikut serta dalam pelaksanaan pengecekan perkembangan kesehatan ini, semoga kita semua selalu diberi kesehatan," tutupnya.

Pewartu: Yahya Yabo
Editor: Nicha Ratnasari



LOWONGAN JURNALIS

Media online **MEDIA KALTIM GROUP** membutuhkan beberapa tenaga profesional untuk bergabung di tim redaksi **SAMARINDA & PENAJAM PASER UTARA (PPU)** :

JURNALIS

SYARAT:

Maksimal usia 25 tahun, berjiwa tim, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kreatif, dan menyukai tantangan. Fresh graduate boleh melamar, diutamakan kandidat berpengalaman bidang jurnalisme atau media

Deadline Pengirim CV & Lamaran 30 September 2023.

Pastikan mencantumkan posisi yang dilamar pada subjek email atau pesan WA.

Kirimkan ke **redaksi@mediakaltim.com**

atau WA ke **0853-4894-3982 (SAMARINDA)**
0815-4910-5488 (PPU)

radar.

MEDIA

MEDIA KALTIM GROUP

